

**PENGARUH KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* DAN  
KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH  
DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**DWI NUR KHOLIFA**

**NIM : 18520085**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2022**

**PENGARUH KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* DAN  
KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH  
DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



**Oleh**

**DWI NUR KHOLIFA**

**NIM : 18520085**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2022**

# LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* DAN  
KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI  
JAWA TIMUR

## SKRIPSI

Oleh

**DWI NUR KHOLIFA**

NIM : 18520085

Telah Disetujui Pada Tanggal 14 Desember 2022

**Dosen Pembimbing,**



**Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA**

**NIP. 197411221999031001**

# LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* DAN  
KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI  
JAWA TIMUR

## SKRIPSI

Oleh

**DWI NUR KHOLIFA**

NIM : 18520085

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 28 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji Utama

**Zuraidah, M.S.A**

NIP : 197612102009122001

2 Ketua Penguji

**Sri Andriani, M.Si**

197503132009122001

3 Sekretaris Penguji

**Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA**

197411221999031001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D**

NIP. 197606172008012020

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nur Kholifa  
NIM : 18520085  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGARUH KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 November 2022

Hormat saya,



Dwi Nur Kholifa

NIM:18520085

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Ibuku dan Bapakku,*

*Sutiana dan Dugel Wahyudi*

*yang teramat aku sayangi*

*Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang  
selalu bapak dan ibu berikan*

*Kakakku, Muhammad Amirudin yang selalu  
memberikan dukungan dan motivasi*

*Seluruh Keluarga Besarku*

*Almamaterku UIN Malang*

*Serta seluruh pihak yang telah memberikan semangat  
dan doa*

**MOTTO**

*“Berpikirlah Positif, Tidak Peduli Seberapa Keras  
Kehidupanmu”*

*(Ali bin Abi Thalib)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Kinerja Berbasis *Value for Money* dan Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur” dapat terselesaikan dengan baik.

Tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa pengerjaan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., M.Res.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak., CA selaku dosen pembimbing.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.



6. Ibu, ayah, kakak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 28 November 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Batasan Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Kajian Teoritis.....	22
2.2.1. Organisasi Sektor Publik .....	22
2.2.2. Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	27
2.2.2.1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja .....	27
2.2.2.2. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	28
2.2.2.3. Indikator Kinerja .....	31
2.2.3. <i>Value for Money</i> .....	33
2.2.3.1. Ekonomi .....	34
2.2.3.2. Efisiensi .....	34

2.2.3.3.	Efektivitas.....	35
2.2.4.	Ketergantungan Keuangan Daerah .....	36
2.2.5.	Alokasi Belanja Modal .....	37
2.2.6.	Perspektif Islam .....	39
2.2.6.1.	Pemerintah sebagai Organisasi Sektor Publik.....	39
2.2.6.2.	Pengukuran Kinerja.....	40
2.2.6.3.	Belanja Pemerintah.....	41
2.3.	Kerangka Konseptual.....	44
2.4.	Hipotesis.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
3.1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
3.2.	Populasi dan Sampel .....	47
3.3.	Teknik Pengambilan Sampel.....	47
3.4.	Data dan Jenis Data .....	49
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6.	Definisi Operasional Variabel.....	50
3.6.1.	Ekonomi (X1) .....	50
3.6.2.	Efisiensi (X2).....	51
3.6.3.	Efektivitas (X3).....	51
3.6.4.	Ketergantungan Keuangan Daerah (X4).....	52
3.6.5.	Alokasi Belanja Modal (Y).....	52
3.7.	Analisis Data .....	53
3.7.1.	Analisis Regresi Linear Berganda .....	53
3.7.2.	Pengujian Hipotesis .....	55
3.7.2.1.	Uji t.....	55
3.7.2.2.	Uji F.....	56
3.7.3.	Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		57
4.1.	Hasil Penelitian .....	57
4.1.1.	Analisis Kinerja .....	57
4.1.1.1.	Ekonomi .....	57

4.1.1.2.	Efisiensi .....	59
4.1.1.3.	Efektivitas.....	63
4.1.1.4.	Ketertanggung Keuangan Daerah.....	67
4.1.2.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	70
4.1.2.1.	Uji Normalitas .....	70
4.1.2.2.	Uji Autokorelasi .....	70
4.1.2.3.	Uji Multikolinieritas .....	71
4.1.2.4.	Uji Heteroskedastisitas .....	72
4.1.3.	Hasil Regresi Linear Berganda.....	73
4.1.4.	Pengujian Hipotesis .....	75
4.1.4.1.	Hasil Uji t .....	75
4.1.4.2.	Hasil Uji F .....	78
4.1.5.	Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	79
4.2.	Pembahasan.....	79
4.2.1.	Pengaruh Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal.....	79
4.2.2.	Pengaruh Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal .....	81
4.2.3.	Pengaruh Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal .....	82
4.2.4.	Pengaruh Ketertanggung Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal .....	84
4.2.5.	Pengaruh Kinerja Berbasis <i>Value for Money</i> (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) dan Ketertanggung Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal .....	86
BAB V PENUTUP.....		88
5.1.	Kesimpulan .....	88
5.2.	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA .....		91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Porsi Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2019-2021 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Kriteria Ekonomi .....	34
Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi .....	35
Tabel 2.4 Kriteria Efektivitas.....	36
Tabel 2.5 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah.....	37
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel .....	48
Tabel 4.1 Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur.....	57
Tabel 4.2 Efisiensi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur .....	60
Tabel 4.3 Efektivitas pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur .....	63
Tabel 4.4 Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur .....	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas .....	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas .....	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	73
Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda .....	73
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	75
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alokasi Belanja Daerah se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021 .....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	44
Gambar 4.1 Diagram Persentase Efisiensi Pemerintah Daerah di Jawa Timur .....	62
Gambar 4.2 Diagram Persentase Efektivitas Pemerintah Daerah di Jawa Timur .....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Rasio Ekonomi

Lampiran 2 Data Rasio Efisiensi

Lampiran 3 Data Rasio Efektivitas

Lampiran 4 Data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Lampiran 5 Data Alokasi Belanja Modal

Lampiran 6 Hasil Uji SPSS

Lampiran 7 Biodata Penulis

## ABSTRAK

Dwi Nur Kholifa. 2022, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Kinerja Berbasis *Value for Money* dan Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur”

Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak., CA

Kata Kunci : Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, Ketergantungan Keuangan Daerah, Kinerja, *Value for Money*, Alokasi Belanja Modal

---

Alokasi belanja modal di banyak daerah lebih rendah dari alokasi belanja pegawai. Di Jawa Timur masih banyak daerah yang mengalokasikan belanja modalnya rendah yaitu pada kisaran 5% - 25%. Kedepannya, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam kisaran 30% - 40%. Dengan adanya kinerja yang baik diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja modalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Jumlah sampel terhitung 109 yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2021 yang diperoleh dari [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id). Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 26.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel efisiensi dan efektivitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan, variabel ekonomi dan ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara simultan, variabel ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja berbasis *value for money* dan ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah di Jawa Timur. Kinerja yang tinggi menunjukkan pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik lagi termasuk penyediaan barang publik yang dibiayai dari alokasi belanja modal.



## ***ABSTRACT***

Dwi Nur Kholifa. 2022, *THESIS*. Title : “*The Effect of Performance Based Value for Money and Regional Financial Dependence on Capital Expenditure Allocation in Local Governments in East Java*”

Supervisor : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak., CA

Keywords : Economy, Efficiency, Effectiveness, Regional Financial Dependence, Performance, Value for Money, Capital Expenditure Allocation

---

The allocation of capital expenditures in many regions is lower than the allocation of employee expenditures. In East Java, there are still many regions that allocate low capital expenditures, namely in the range of 5% - 25%. In the future, local governments are expected to increase the allocation of capital expenditures in the range of 30% - 40%. With good performance, it is hoped that local governments can increase their capital expenditure allocation. The purpose of this study is to test the effect of performance based value for money (economy, efficiency, effectiveness) and regional financial dependence on capital expenditure allocation.

This type of research is quantitative research with a descriptive approach. The population of this study is the Local Governments in East Java. The number of samples counted 109 was determined by purposive sampling technique. The data used is in the form of a Budget Realization Report for 2018-2021 obtained from [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id). Data analysis using multiple linear regression analysis with the help of IBM SPSS Statistics 26 software.

The results showed that partially the variables of efficiency and effectiveness did not have a significant effect on the allocation of capital expenditures. Meanwhile, the variables of economy and regional financial dependence hve a significant effect on the allocation of capital expenditures. Simultaneously, the variables of economy, efficiency, effectiveness, and regional financial dependence have a significant influence on the allocation of capital expenditures. This shows that performance based value for money and regional financial dependence have a significant effect on the allocation of capital expenditure to local governments in East Java. The high performance shows that the government is able to provide even better public services including the provision of public goods financed from the allocation of capital expenditures.

## الملخص

دوي نور خليفة. ٢٠٢٢ . أطروحة. العنوان: "تأثير القيمة مقابل الأداء القائم على المال والاعتماد المالي الإقليمي على تخصيص النفقات الرأسمالية في الحكومات المحلية في جاوة الشرقية" المشرف : أحمد فخر الدين علم شاة، الماجستير  
الكلمات المفتاحية : الاقتصاد ، الكفاءة ، الفعالية ، الاعتماد المالي الإقليمي ، الأداء ، القيمة مقابل المال ، تخصيص النفقات الرأسمالية

تخصيص النفقات الرأسمالية في العديد من المناطق أقل من تخصيص نفقات الموظفين. في جاوة الشرقية ، لا تزال هناك العديد من المناطق التي تخصص نفقات رأسمالية منخفضة ، أي في حدود ٥٪ - ٢٥٪. في المستقبل ، من المتوقع أن تزيد الحكومات المحلية من تخصيص النفقات الرأسمالية في حدود ٣٠٪ - ٤٠٪. مع الأداء الجيد ، من المأمول أن تتمكن الحكومات المحلية من زيادة مخصصاتها من النفقات الرأسمالية. الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثير الأداء القائم على القيمة مقابل المال (الاقتصاد والكفاءة والفعالية) والاعتماد المالي الإقليمي على تخصيص النفقات الرأسمالية.

هذا النوع من البحث هو بحث كمي مع نهج وصفي. مجتمع هذه الدراسة هو حكومة ريجنسي / المدينة في جاوة الشرقية. تم تحديد عدد العينات التي تم إحصاؤها ١٠٩ بواسطة تقنية أخذ العينات الهادفة. البيانات المستخدمة هي في شكل تقرير تحقيق الميزانية للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١ التي تم الحصول عليها من [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد بمساعدة برنامج IBM SPSS Statistics 26.

أظهرت النتائج أن متغيرات الكفاءة والفعالية لم يكن لها تأثير كبير على تخصيص النفقات الرأسمالية. وفي الوقت نفسه ، فإن المتغيرات الاقتصادية والاعتماد المالي الإقليمي لها تأثير كبير على تخصيص النفقات الرأسمالية. وفي الوقت نفسه ، فإن المتغيرات الاقتصادية والكفاءة والفعالية والاعتماد على الموارد المالية الإقليمية لها تأثير كبير على تخصيص النفقات الرأسمالية. وهذا يدل على أن الأداء القائم على القيمة مقابل المال والاعتماد المالي الإقليمي لهما تأثير كبير على تخصيص النفقات الرأسمالية للحكومات المحلية في جاوة الشرقية. يظهر الأداء العالي أن الحكومة قادرة على تقديم خدمات عامة أفضل بما في ذلك توفير السلع العامة الممولة من تخصيص النفقات الرأسمالية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik (Mahsun, 2013:13). Organisasi sektor publik bermakna bahwa organisasi tersebut dalam kegiatannya berorientasi pada kepentingan publik bukan semata-mata mencari laba. Berdasarkan makna organisasi sektor publik tersebut, pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada publik atau masyarakat.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri wilayah daerahnya termasuk dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. Di peraturan tersebut, dijelaskan definisi pengelolaan keuangan daerah yang merupakan segala aktivitas termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, serta bertanggungjawab.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD. APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan daerah yang penetapannya berdasarkan peraturan daerah. Menurut Mardiasmo (2018:76) anggaran merupakan “rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”.

Anggaran dapat mencerminkan keadaan finansial pemerintah daerah. Dana yang bersumber dari APBD tersebut digunakan seluruhnya untuk membiayai kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah daerah.

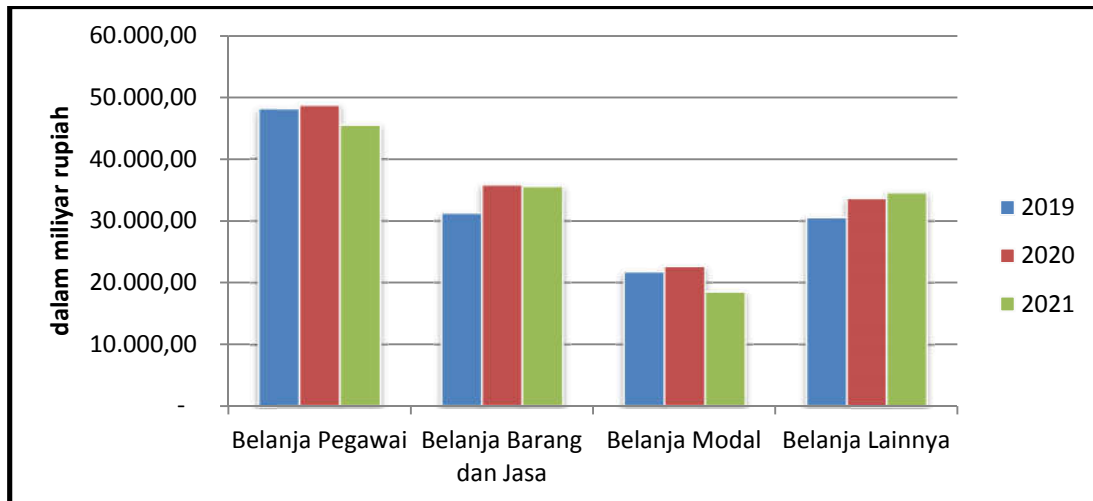
Komponen APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran belanja daerah dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional merupakan perencanaan untuk pengeluaran yang bersifat rutin, memiliki masa manfaat jangka pendek (satu tahun anggaran), dan tidak menambah kekayaan pemerintah. Sedangkan, anggaran modal merupakan perencanaan terhadap pengeluaran yang memiliki masa manfaat jangka panjang (lebih dari satu periode anggaran) dan dapat menambah kekayaan pemerintah.

Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menyebut alokasi belanja modal di banyak pemerintah daerah lebih rendah dari alokasi belanja pegawai. Anggaran yang digunakan untuk belanja operasional termasuk belanja pegawai hampir 70% bahkan ada yang sampai 80%, anggaran untuk belanja modal tersisa 12%. Ke depannya, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan alokasi belanja modal hingga 30% sampai 40% dari keseluruhan belanja daerah (Kristianus, 2021).

Di Jawa Timur sendiri, menurut pernyataan Agung Firman Sampurna selaku Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menyebut masih banyak daerah di Jawa Timur yang mengalokasikan belanja modalnya rendah. Padahal kualitas APBD yang baik dapat dinilai dari tingginya belanja modal. Tingginya belanja modal tersebut

menandakan berjalannya pembangunan serta baiknya kualitas pelayanan publik di suatu daerah (Mihrob, 2021).

**Gambar 1.1**  
**Diagram Alokasi Belanja Daerah se-Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2019-2021**



Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Masing-masing dari Kabupaten/Kota tersebut mengalokasikan belanja daerah dengan jumlah yang berbeda-beda. Dari gambar 1.1 di atas, diketahui bahwa alokasi belanja daerah se-Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 masih didominasi oleh belanja pegawai. Alokasi belanja modal masih rendah, lebih rendah dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya. Belanja pegawai tahun 2019 terhitung sebesar Rp48.218,97 M, tahun 2020 sebesar Rp48.761,97 M, dan tahun 2021 sebesar Rp45.550,94 M. Belanja barang dan jasa tahun 2019 terhitung sebesar Rp31.311,95 M, tahun 2020 sebesar 35.918,20 M, dan tahun 2021 sebesar Rp35.629,99 M. Belanja lainnya tahun 2019 terhitung Rp30.600,28 M, tahun 2020 sebesar Rp33.709,54 M, dan tahun 2021 sebesar Rp34.658,71 M. Adapun belanja modal

tahun 2019 terhitung sebesar Rp21.846,05 M, tahun 2020 sebesar Rp22.705,26 M, dan tahun 2021 sebesar Rp18.575,73 M.

**Tabel 1.1**  
**Porsi Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2019-2021**

No	Pemerintah Daerah	Alokasi Belanja Modal (%)		
		2019	2020	2021
1	Kab. Bangkalan	16,95	10,34	11,39
2	Kab. Banyuwangi	17,06	16,45	18,94
3	Kab. Blitar	21,01	18,28	13,50
4	Kab. Bojonegoro	33,08	37,76	31,73
5	Kab. Bondowoso	15,12	13,46	12,17
6	Kab. Gresik	17,95	19,06	13,65
7	Kab. Jember	22,59	17,62	15,31
8	Kab. Jombang	11,07	10,73	10,71
9	Kab. Kediri	20,88	20,07	13,13
10	Kab. Lamongan	16,56	13,31	13,95
11	Kab. Lumajang	12,59	12,33	10,06
12	Kab. Madiun	17,09	15,93	10,93
13	Kab. Magetan	11,75	13,04	7,73
14	Kab. Malang	17,63	15,12	13,40
15	Kab. Mojokerto	19,89	14,01	12,60
16	Kab. Nganjuk	12,19	10,16	9,62
17	Kab. Ngawi	15,51	16,39	14,45
18	Kab. Pacitan	18,34	12,28	13,01
19	Kab. Pamekasan	19,34	23,54	18,86
20	Kab. Pasuruan	13,37	17,08	14,49
21	Kab. Ponorogo	16,05	14,93	19,10
22	Kab. Probolinggo	13,39	14,26	14,23
23	Kab. Sampang	18,06	17,99	20,67
24	Kab. Sidoarjo	21,06	24,44	21,99
25	Kab. Situbondo	16,13	15,34	15,27
26	Kab. Sumenep	17,24	13,76	9,59
27	Kab. Trenggalek	18,89	15,38	13,58
28	Kab. Tuban	16,36	16,94	10,86
29	Kab. Tulungagung	10,49	11,63	8,86
30	Kota Blitar	21,78	14,63	13,03
31	Kota Kediri	10,03	8,78	5,71
32	Kota Madiun	22,56	22,38	17,33
33	Kota Malang	16,12	22,98	13,61
34	Kota Mojokerto	19,23	18,77	20,93
35	Kota Pasuruan	22,25	20,12	17,08

**Tabel 1.1**  
**Porsi Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2019-2021**

No	Pemerintah Daerah	Alokasi Belanja Modal (%)		
		2019	2020	2021
36	Kota Probolinggo	22,52	19,52	15,36
37	Kota Surabaya	29,52	29,85	24,11
38	Kota Batu	12,27	8,20	14,87

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa masih banyak daerah di Jawa Timur yang mengalokasikan belanja modal di bawah 30%. Kebanyakan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal dalam range 5% - 25%. Pemerintah Daerah Kota Surabaya mengalokasikan belanja modal di tahun 2019 dan 2020 hampir mendekati 30% yaitu 29,52% dan 29,85%. Sedangkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sudah melebihi 30% menuju 40% dalam mengalokasikan belanja modal di tahun 2019, 2020, dan 2021, yaitu 33,08%, 37,76%, dan 31,73%. Untuk kedepannya pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam 30% sampai 40% dari keseluruhan belanja daerah.

Pemerintah Daerah sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dituntut pertanggungjawabannya atas uang publik yang digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan keuangan sektor publik. Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah, pihak publik atau masyarakat dapat menilai atau mengukur kinerja pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2018:151) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai berikut: “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui

alat ukur finansial dan nonfinansial”. Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang andal diharapkan pemerintah selalu meningkatkan kinerjanya.

Salah satu tujuan dari pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah “untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan” (Mardiasmo, 2018:152). Sumber daya dapat berupa biaya-biaya termasuk belanja modal. Oleh karena itu, kinerja terindikasi berpengaruh terhadap alokasi sumber daya termasuk alokasi belanja modal. Selain itu, menurut Yanto & Astuti (2020) perubahan kinerja keuangan mempunyai dampak terhadap perubahan alokasi belanja modal. Dengan terciptanya kinerja yang baik diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Pada penelitian ini, kinerja didasarkan pada *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan ketergantungan keuangan daerah.

Konsep *value for money* penting untuk diperhatikan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan termasuk pembangunan di daerah yang sangat ditentukan oleh besarnya alokasi belanja modal. Siregar (2018) menyatakan kinerja keuangan yang baik dengan memenuhi kriteria *value for money* dapat memberikan pengaruh pada kinerja pembangunan yang baik. Namun, kinerja yang sangat ekonomis dan efektif tidak mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Menurut Basariyah (2017) dalam Wati et al. (2022), *value for money* menghendaki adanya tingkat ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya termasuk alokasi belanja modal.

Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal (Mardiasmo, 2018:163). Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal (Harjito, Lestari, Siddiq,



2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria (2020) yang menyatakan bahwa efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Agus & Safri (2016) serta Arif & Arza (2018) yang menyatakan bahwa efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Martini & Dwirandra (2015) menyatakan bahwa efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal serta penelitian yang dilakukan Indiyanti & Rahyuda (2018) menyatakan bahwa efisiensi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Efektivitas menggambarkan keberhasilan dalam mencapai hasil atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018:164). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum & Sugiyanto (2021) serta Agus & Safri (2016) efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria (2020) serta Praza (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Kawatu, 2019:98). Pendapatan transfer dari pusat kebanyakan digunakan untuk belanja pegawai, padahal belanja modal perlu dioptimalkan karena belanja modal berpengaruh terhadap pembangunan dan penyerapan tenaga kerja yang ada di daerah. Pada kenyataannya, realisasinya menunjukkan bahwa pembangunan tersebut belum maksimal (Siswoko, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martini & Dwirandra (2015) serta Praza (2016) menemukan bahwa ketergantungan keuangan

daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlianita & Saleh (2020) menemukan bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas masih terdapat ketidak konsistenan atas hasil penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh Kinerja Berbasis *Value for Money* dan Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal?
2. Apakah efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal?
3. Apakah efektivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal?
4. Apakah ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal?
5. Apakah ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan keuangan daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh ekonomi terhadap alokasi belanja modal?
2. Untuk menguji pengaruh efisiensi terhadap alokasi belanja modal?
3. Untuk menguji pengaruh efektivitas terhadap alokasi belanja modal?
4. Untuk menguji pengaruh ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal?
5. Untuk menguji pengaruh ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan keuangan daerah secara simultan terhadap alokasi belanja modal?

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### 1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal menambah perbendaharaan teori atau konsep mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah.

#### 2. Kontribusi Praktis

- a. Penulis dapat mengetahui lebih dalam mengenai kinerja keuangan daerah dan belanja modal.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal menjadi pertimbangan untuk penetapan anggaran di tahun-tahun selanjutnya.
- c. Bagi peneliti lain berkontribusi dalam hal menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini didasarkan atas konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan ketergantungan keuangan daerah.
2. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2021.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Satria (2020), Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di PSTNT Batan Bandung	Variabel independen terdiri atas rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Sedangkan, variabel dependen meliputi alokasi belanja modal.	Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 20.	Secara parsial, rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan secara simultan rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
2.	Marlianita & Saleh (2020), Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel independen terdiri atas rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA. Sedangkan, variabel dependen meliputi alokasi belanja modal.	Analisis data adalah analisis regresi data panel dengan bantuan program <i>Eviews 9</i> .	Secara parsial, rasio derajat desentralisasi maupun rasio ketergantungan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara simultan, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				modal.
3.	Harjito, Lestari, Siddiq (2020), Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota Ditinjau dari Indikator Kinerja Keuangan Daerah	Variabel independen terdiri atas kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan, DSCR, dan keserasian belanja. Sedangkan, variabel dependen meliputi alokasi belanja modal.	Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 21.	Kemandirian keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, dan keserasian belanja berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun, efektivitas PAD dan <i>debt service coverage ratio</i> (DSCR) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
4.	Putri & Rahayu (2019), Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat	Variabel independen meliputi derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD. Sedangkan, variabel dependen meliputi belanja modal.	Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang mana diuji dengan bantuan program Eviews 9.0.	Kinerja berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	Martini & Dwirandra (2015), Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	Variabel independen terdiri atas rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan SiLPA, rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi BUMD. Sedangkan, variabel dependen meliputi alokasi belanja modal.	Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS.	Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.
6.	Kusumaningrum & Sugiyanto (2021), Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, <i>Fiscal Stress</i> , dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal pada Provinsi	Variabel independen terdiri atas rasio kemandirian, rasio efektivitas, pertumbuhan ekonomi, <i>fiscal stress</i> , dan kepadatan penduduk. Sedangkan, variabel dependen meliputi alokasi belanja	Analisis data menggunakan model regresi linear berganda.	Rasio kemandirian dan <i>fiscal stress</i> berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio efektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kepadatan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Kemudian secara simultan, kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, <i>fiscal stress</i> , dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Indikator</b>	<b>Metode/ Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	Kalimantan Utara	modal.		
7.	Agus & Safri (2016), Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin	Variabel independen terdiri atas derajat otonomi fiskal, efektivitas, dan efisiensi. Sedangkan, variabel dependen meliputi belanja modal.	Analisis data yang digunakan adalah model regresi linear berganda.	Hasil dari regresi linear berganda dengan variabel derajat otonomi fiskal, efektivitas, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kinerja keuangan maka belanja modal juga akan ikut naik.
8.	Indiyanti & Rahyuda (2018), Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	Variabel independen terdiri atas rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, derajat kontribusi BUMD, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi keuangan daerah. Sedangkan, variabel dependen meliputi alokasi belanja modal.	Analisis data yang digunakan adalah model regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 23.	Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan, kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
9.	Praza (2016), Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi	Variabel independen terdiri atas rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio derajat kontribusi BUMD, dan rasio efektivitas PAD. Sedangkan, variabel dependen meliputi alokasi belanja modal.	Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).	Kinerja keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara parsial, rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, dan rasio derajat kontribusi BUMD berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
10.	Arif & Arza (2018), Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017	Variabel independen terdiri atas kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan keserasian belanja. Sedangkan, variabel dependen meliputi alokasi belanja modal.	Analisis data yang digunakan adalah model regresi data panel dengan bantuan program <i>Eviews 8</i> .	Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Keserasian belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
11.	Siregar (2018), Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value For Money dalam Konteks New Public Management dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau	Variabel independen meliputi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan, variabel dependen meliputi pertumbuhan belanja modal.	Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.	Rasio ekonomis berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan belanja modal. Rasio efisiensi dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja modal. Idealnya, kinerja keuangan yang baik dengan memenuhi kriteria <i>value for money</i> sudah seharusnya memberikan pengaruh pada kinerja pembangunan yang baik. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak demikian, dimana kinerja yang ‘sangat ekonomis’ dan efektif pada kenyataannya tidak mempengaruhi keputusan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi Belanja Modal yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan di Provinsi Riau ini. Hal ini dapat disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dalam pengalokasian Belanja Modal tersebut yang dapat disebabkan karena keputusan politik di pemerintahan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel 2.1 di atas, penulis menjelaskan perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Perbedaan dan persamaan tersebut ditinjau dari objek, variabel, dan metode analisis data. Berikut ini perbedaan dan persamaannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satria (2020) menjadikan PSTNT Batan Bandung sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu terdiri atas rasio efektivitas dan rasio efisiensi, sedangkan penelitian ini menambahkan rasio ekonomi dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Selain itu, metode analisis data sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marlianita & Saleh (2020) menjadikan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Untuk metode analisis data pada penelitian terdahulu

menggunakan analisis regresi data panel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harjito, Lestari, Siddiq (2020) maupun penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu terdiri atas kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan, DSCR, dan keserasian belanja, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Selain itu, metode analisis data sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Rahayu (2019) menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu meliputi derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Untuk metode analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi data panel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martini & Dwirandra (2015) menjadikan Provinsi Bali sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu meliputi rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan SiLPA, rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi BUMD, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Untuk metode analisis data pada penelitian terdahulu maupun penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumaningrum & Sugiyanto (2021) menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu terdiri atas rasio kemandirian, rasio efektivitas, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Selain itu, metode analisis data sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus & Safri (2016) menjadikan Kabupaten Merangin sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel

independen pada penelitian terdahulu terdiri atas derajat otonomi fiskal, efektivitas, dan efisiensi, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Selain itu, metode analisis data sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018) menjadikan Provinsi Bali sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu terdiri atas rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, derajat kontribusi BUMD, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi keuangan daerah, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Selain itu, metode analisis data sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Praza (2016) menjadikan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu terdiri atas rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio derajat kontribusi BUMD, dan rasio efektivitas PAD, sedangkan

penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Untuk metode analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model (FEM)*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif & Arza (2018) menjadikan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu terdiri atas kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan keserasian belanja, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan alokasi belanja modal. Untuk metode analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan regresi data panel, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar (2018) menjadikan Provinsi Riau sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Adapun variabel independen pada penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah pertumbuhan belanja modal, sedangkan penelitian ini menggunakan

alokasi belanja modal. Untuk metode analisis data pada penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

## **2.2. Kajian Teoritis**

### 2.2.1. Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah “organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum” (Mahsun, 2013:14). Pengertian lain dari organisasi sektor publik yaitu organisasi yang berfokus pada pemberian dan penyediaan pelayanan publik dan tidak mengutamakan laba atau *non profit oriented*. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik tersebut tidak hanya *non profit oriented* tetapi juga *profit oriented*.

Jenis organisasi sektor publik berupa lembaga swadaya masyarakat, badan-badan pemerintah (pusat dan daerah), organisasi politik/organisasi masa, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, yayasan, universitas, dan organisasi nirlaba. Ada juga yang menggolongkan organisasi sektor publik menjadi tiga kelompok yang meliputi pemerintahan (pusat, daerah, desa), organisasi sektor publik milik pemerintah contohnya BUMN dan BUMD, organisasi sektor publik yang didirikan oleh masyarakat atau perusahaan swasta yang biasanya berupa yayasan.



Adapun, jenis organisasi sektor publik jika dilihat berdasarkan tujuan operasinya meliputi *pure-nonprofit organization* dan *quasi-nonprofit organization*. *Pure-nonprofit organization* merupakan organisasi sektor publik yang dalam operasinya menjual barang atau jasa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk jenis organisasi ini adalah pemerintah. Sedangkan, *quasi-nonprofit organization* merupakan organisasi sektor publik yang dalam operasinya menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat serta mencari laba sebagai kontribusi pendapatan negara atau daerah. Yang termasuk jenis organisasi ini adalah BUMN dan BUMD.

Karakteristik organisasi sektor publik yang utama yaitu memberikan pelayanan publik yang maksimal, tidak memaksimalkan profit dan dimiliki oleh publik. Berikut ini penjelasan rinci mengenai karakteristik organisasi sektor publik:

a. Tujuan

Pengadaan pelayanan publik (*public services*) merupakan tujuan utama organisasi sektor publik dan tidak untuk memaksimalkan keuntungan. Contoh pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan (sekolah atau universitas), kesehatan masyarakat (puskesmas), transportasi, penegakan hukum, penyediaan barang kebutuhan publik (seperti barang kebutuhan pokok masyarakat), dan keamanan. Meskipun tujuan utama organisasi sektor publik menyediakan layanan publik, akan tetapi organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial. Tujuan finansial ini berbeda dengan

tujuan organisasi sektor privat yang memaksimalkan keuntungan. Tujuan finansial organisasi sektor publik yaitu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN/BUMD). Tujuan finansial ini oleh organisasi sektor publik ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan publik karena untuk memberikan pelayanan publik diperlukan dana.

b. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yaitu menyediakan pelayanan publik ( publik services ) seperti dalam bidang keamanan, pendidikan, penegakan hukum, kesehatan, penyediaan pangan, dan transportasi publik.

c. Sumber Pembiayaan

Penggunaan dana pada organisasi sektor publik sebagai sumber pembiayaan diperoleh dari pendapatan sah yang tidak melanggar peraturan seperti pajak dan retribusi, pendapatan dari perusahaan publik (BUMN/BUMD), utang luar negeri, dan pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi pemerintah. Pertimbangan politik dan sosial, serta pertimbangan ekonomi menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan pemilihan struktur pembiayaan.

#### d. Pola Pertanggungjawaban

Manajemen organisasi sektor publik perlu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam hal penggunaan sumber dana untuk memberikan pelayanan publik. Hal tersebut perlu dilakukan karena dana tersebut diperoleh dari masyarakat (public money). Pertanggungjawaban dalam organisasi sektor publik memiliki pola yang sifatnya vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban yang sifatnya vertikal merupakan pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan dana kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi, misalnya pemerintah daerah bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana kepada pemerintah pusat atau pemerintah pusat bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan, pertanggungjawaban yang sifatnya horizontal adalah pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat dalam hal pengelolaan dana. Jenis-jenis pertanggungjawaban tersebut menjadi bagian penting dalam proses akuntabilitas publik.

#### e. Kultur Organisasi

Pada organisasi sektor publik terdapat pengaruh politik yang sangat tinggi. Fungsi, strategi, dan tujuan organisasi menjadi acuan dalam menentukan susunan organisasi. Susunan organisasi sektor publik mempunyai sifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Susunan birokrasi pada sektor publik dapat dipengaruhi oleh watak pemimpin serta pilihan dan penyesuaian kebijakan politik. Organisasi sektor publik mempunyai fungsi yang kompleks dan kompleksitas ini dapat mempengaruhi susunan

organisasi. Misalnya, pemerintah mempunyai fungsi yang lebih beraneka ragam. Keragaman ini berupa manajemen ekonomi makro, penyediaan barang dan jasa pelayanan publik, perlindungan sumber daya alam dan sosial, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan, serta stabilitas perekonomian dan politik.

f. Penyusunan Anggaran

Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Oleh karena itu, dalam merencanakan program atau menyusun anggaran perlu adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Hal itu ditujukan untuk transparansi anggaran. Program yang telah direncanakan kemudian dipublikasikan untuk diberi komentar dan dirundingkan oleh masyarakat dan kemudian dilakukan pengesahan oleh perwakilan masyarakat yaitu orang-orang yang menjabat sebagai DPR dan DPRD.

g. Pemangku Kepentingan

Yang termasuk pemangku kepentingan atau stakeholder dalam organisasi sektor publik yaitu masyarakat Indonesia, pegawai organisasi, pemberi pinjaman (kreditor), pemberi dana (investor), lembaga-lembaga internasional meliputi lembaga donor internasional sebagai contoh Bank Dunia dan juga pemerintah luar negeri.

## 2.2.2. Kinerja dan Pengukuran Kinerja

### 2.2.2.1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Menurut Mahsun (2013:25) kinerja adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”. Jadi, kinerja identik dengan prestasi atau tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan suatu kegiatan/program/kebijakan.

Kinerja dapat diketahui jika ada kriteria keberhasilan yang ditetapkan untuk mengukur kinerja tersebut. Kriteria keberhasilan tersebut meliputi target-target atau sasaran-sasaran tertentu yang ingin dicapai. Tanpa adanya tolok ukur, kinerja organisasi tidak mungkin bisa diketahui.

Untuk mengetahui seberapa berhasil kegiatan/program/kegiatan, maka organisasi membutuhkan alat untuk mengukur kinerja atau sering disebut pengukuran kinerja. Menurut Mardiasmo (2018:151) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai berikut: “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu

manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Menurut Mahmudi (2019:6) “pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan”. Menurut Mahsun (2013:26) menyatakan bahwa “pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”.

Pengukuran kinerja adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja para manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pentingnya mengukur kinerja adalah untuk menilai seberapa tinggi tanggung jawab organisasi dan manajer dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Tanggung jawab menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif.

#### 2.2.2.2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan dari pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik menurut Mahmudi (2019:14) adalah sebagai berikut.

##### a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi dan memantau berjalannya

kegiatan organisasi sudah sesuai atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dari pengukuran kinerja diketahui ada penyimpangan dari tujuan organisasi, maka perlu adanya tindakan koreksi atau perbaikan yang harus dilakukan oleh pimpinan. Pengukuran kinerja didesain untuk memonitor rencana-rencana organisasi, mengetahui berhasil atau tidaknya rencana organisasi, serta melakukan koreksi.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menyediakan sarana pembelajaran pegawai dalam hal tindakan pegawai dalam organisasi dan memberikan dasar bagi pegawai untuk memperbaiki perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja guna pencapaian kinerja yang terbaik. Dengan adanya pengukuran kinerja, seseorang dapat diketahui kinerjanya baik atau buruk. Pengukuran kinerja dapat menjadi sarana pembelajaran pegawai melalui gambaran kinerja masa lalu, evaluasi kinerja masa kini, dan identifikasi solusi terhadap permasalahan kinerja saat ini serta membuat keputusan-keputusan untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki kinerja di periode-periode berikutnya. Perbaikan kinerja perlu dilakukan secara terus-menerus agar tujuan organisasi tercapai

dan organisasi dapat terus berkembang. Kinerja pada saat ini harus lebih baik dari kinerja masa lalu dan kinerja periode-periode berikutnya harus lebih baik dari kinerja masa lalu ataupun kinerja saat ini.

d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*)

Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat manajemen bagi organisasi sebab terdapat penetapan sistem penghargaan dan sanksi. Pimpinan dapat memberikan penghargaan kepada pegawai dengan kinerja yang baik, sedangkan pegawai dengan kinerja buruk diberikan sanksi. Penghargaan tersebut dapat berupa kenaikan gaji, bonus, atau promosi, sedangkan sanksi dapat berupa teguran atau pemutusan kerja.

e. Memotivasi pegawai

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja dapat diketahui baik buruknya kinerja pegawai. Pegawai dengan kinerja yang baik dapat memperoleh reward. Reward inilah yang memotivasi pegawai untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

f. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja dibutuhkan untuk menciptakan akuntabilitas publik. Kinerja perlu diukur dan dilaporkan dalam



bentuk laporan kinerja. Pelaporan kinerja dibutuhkan oleh pihak internal guna meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, pelaporan kinerja juga dibutuhkan oleh pihak eksternal guna mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik.

#### 2.2.2.3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah “kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu” (Mahsun, 2013:71). Indikator kinerja sangat penting dalam pengukuran kinerja karena tanpa indikator tersebut akan sulit untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja. Indikator kinerja pada setiap organisasi akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut.

Indikator kinerja pada pemerintah daerah menurut Mahsun (2013:196) meliputi indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat, indikator dampak.

##### a. Indikator Masukan

Indikator masukan merupakan segala sesuatu atau sumberdaya yang dipergunakan dalam penyelesaian kegiatan guna menghasilkan keluaran. Yang termasuk indikator ini misalnya jumlah dana yang diperlukan, jumlah pegawai yang

diperlukan, jumlah infrastruktur yang tersedia, dan jumlah waktu yang dipakai.

b. Indikator Proses

Indikator proses merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah masukan menjadi keluaran termasuk dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang termasuk indikator ini misalnya ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran

Indikator keluaran merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun nonfisik. Yang termasuk indikator ini misalnya jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil

Indikator hasil merupakan segala sesuatu atau hasil nyata yang diperoleh setelah adanya keluaran. Yang termasuk indikator ini misalnya tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat

Indikator manfaat merupakan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Indikator ini menunjukkan hal

yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal. Yang termasuk indikator ini misalnya tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

f. Indikator Dampak

Indikator dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut baik positif maupun negatif. Yang termasuk indikator ini misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### 2.2.3. *Value for Money*

*Value for Money* diartikan sebagai “penghargaan terhadap nilai uang” (Mahmudi, 2019:83). Berdasarkan pernyataan tersebut *Value for Money* berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai dan digunakan dengan sebaik-baiknya. *Value for Money* merupakan sebuah pendekatan untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik.

Organisasi sektor publik dituntut untuk menerapkan konsep *Value for Money* dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa sektor publik adalah sumber inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan organisasi yang selalu merugi. Karena pentingnya konsep tersebut, maka pengukuran kinerja sektor publik berfokus pada pengukuran tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

### 2.2.3.1. Ekonomi

Ekonomi berarti “pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*)” (Mardiasmo, 2018:165). Ekonomi juga berarti tidak ada pemborosan dalam pengelolaan serta harus hati-hati dan cermat. Ekonomi berkaitan dengan seberapa jauh organisasi dapat menghindari pemborosan dan tidak produktif. Ekonomi membandingkan *input* dengan nilai rupiah *input* tersebut.

Menurut Mahsun (2013:186) tingkat ekonomi berarti “pengukuran terhadap tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik”. Untuk mengetahui berapa tingkat ekonomi dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Ekonomi**

<b>Persentase Nilai Kinerja</b>	<b>Kriteria</b>
<100%	Ekonomis
=100%	Ekonomi berimbang
>100%	Tidak ekonomis

Sumber: Mohamad Mahsun (2013:186)

### 2.2.3.2. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018:165) efisiensi berarti “*output* dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*)”. Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara *output*

berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Efisiensi membandingkan *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan.

Menurut Mahsun (2013:187) tingkat efisiensi berarti “pengukuran tingkat *output* terhadap tingkat *input* organisasi sektor publik”. Untuk mengetahui berapa tingkat efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Efisiensi**

<b>Persentase Nilai Kinerja</b>	<b>Kriteria</b>
<100%	Efisien
=100%	Efisiensi berimbang
>100%	Tidak efisien

Sumber: Mahsun (2013:187)

#### 2.2.3.3. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:166) efektivitas berarti “kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*)”. Efektivitas menggambarkan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sederhananya, efektivitas membandingkan *outcome* dengan *output*. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Menurut Mahsun (2013:191) efektivitas adalah “ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Efektivitas mengukur tingkat *output* terhadap target pendapatan organisasi sektor publik. Untuk mengetahui berapa tingkat efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Efektivitas**

<b>Persentase Nilai Kinerja</b>	<b>Kriteria</b>
<100%	Tidak efektif
=100%	Efektivitas berimbang
>100%	Efektif

Sumber: Mahsun (2013:187)

#### 2.2.4. Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah merupakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diketahui dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Jika hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah tinggi maka tinggi pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi (Kawatu, 2019: 98).

$$\text{Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Persentase Nilai Kinerja</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% – 10,00%	Sangat Rendah
10,01% - 20,00%	Rendah
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup Tinggi
40,01% - 50,00%	Tinggi
>50,00%	Sangat Tinggi

Sumber: Bangga (2017) dalam (Zukhri, 2020)

#### 2.2.5. Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 ayat (3) dijelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Mardiasmo (2018:83) menyatakan bahwa belanja modal merupakan “pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran, akan menambah kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya”. Alokasi belanja modal itu sendiri merupakan perencanaan terhadap pengeluaran yang memiliki masa manfaat jangka panjang (lebih dari satu periode anggaran) dan dapat menambah kekayaan pemerintah. Alokasi belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya jangka panjang. Alokasi belanja modal termasuk dalam investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengadaan aset yang dibiayai dari anggaran belanja modal harus sesuai dengan kriteria yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan,

digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan sesuai kriteria batas minimal kapitalisasi aset yang ditetapkan dalam Perkada. Aset tetap dinilai sebesar harga beli atau harga membangun ditambah seluruh belanja terkait aset tersebut sampai siap untuk dipakai. Aset tetap yang dibiayai oleh anggaran belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja irigasi, jalan, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Belanja modal itu sendiri berdampak pada bertambahnya kapasitas produksi dalam perekonomian melalui bertambahnya aset-aset produktif misalnya gedung, mesin, dan infrastruktur. Jika aset produktif bertambah cepat, maka potensi kecepatan naiknya produksi dalam perekonomian semakin tinggi. Sehingga APBD untuk belanja modal tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tetapi juga memperkuat potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Menurut Arif dan Arza (2018: 28) alokasi belanja modal merupakan “perbandingan antara anggaran belanja modal dengan anggaran total belanja daerah”. Berikut ini skala rasio dari alokasi belanja modal.

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Anggaran Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$



## 2.2.6. Perspektif Islam

### 2.2.6.1. Pemerintah sebagai Organisasi Sektor Publik

Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan publik seperti menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities*. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam, yang mana Rasul menjadikan ketersediaan air bersih bagi setiap rumah tangga sebagai fokus utama pemerintah. Adapun pada masa kekhalifahan Islam, pemerintah banyak membangun dan memelihara jalan, jembatan, dan kanal irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan publik. Pada masa Nabi Muhammad Saw., kebijakan keuangan publik dinilai masih sederhana yang terpusat di Madinah. Kebijakan tersebut meliputi penghimpunan dan pendistribusian pendapatan pada kebutuhan kolektif masyarakat. Pada masa Umar bin Khattab, pengelolaan keuangan publik perlu diatur secara sistematis karena tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah saja melainkan dibutuhkan juga untuk kebutuhan masyarakat di wilayah taklukan. Pada periode inilah, *bayt al-mal* memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kemakmuran masyarakat (Jaelani, 2018).

Keuangan publik didistribusikan melalui *bayt al-mal* kepada kelompok masyarakat lemah dan marginal sehingga terciptalah

keamanan masyarakat, kesejahteraan umum, dan pendistribusian harta secara adil. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an berikut ini.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Qs. al-Hasyr, 59:7).*

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur guna perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Selain itu, pemerintah wajib membiayai belanja untuk layanan publik. Layanan publik yang diberikan harus sesuai dengan kepentingan umum.

#### 2.2.6.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada organisasi meliputi pengukuran kinerja pegawai dan pengukuran organisasi itu sendiri. Dalam Islam dianjurkan untuk mengukur kinerja khususnya kinerja individu. Berikut ini ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi rujukan untuk mengukur kinerja.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ <sup>ط</sup> وَسُرُدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Qs. at-Taubah, 9:105).*

Kata *'amalakum* mempunyai arti amalmu atau pekerjaanmu, yang juga berarti sebagai amalan di dunia berupa prestasi selama di dunia. Hasil dari amalan atau pekerjaan tersebut disebut kinerja dalam bahasa manajemen. Ungkapan *sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minin* terindikasi mengandung makna pelaksanaan pengukuran kinerja yang mana para penilai tidak Allah saja, tetapi juga melibatkan pihak lain yaitu Rasul dan kaum Mukmin (Maguni & Maupa, 2018).

### 2.2.6.3. Belanja Pemerintah

Pengendalian anggaran yang efektif dan efisien merupakan dasar dalam menyusun kebijakan belanja pemerintah. Adapun dalam Islam, kebijakan belanja pemerintah dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Nasution (2006) dalam (Aini, 2019) menyatakan bahwa belanja pemerintah didasarkan pada:

- a. Kebijakan belanja rutin harus berdasarkan kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu serta bukan juga kepentingan pemerintah.
- b. Memenuhi kaidah efisiensi yang mana memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Hal ini akan menghindarkan pemerintah dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya pada sektor-sektor yang sesuai syariah.
- c. Kebijakan belanja pemerintah harus sesuai dengan prinsip keadilan yang mana tidak terfokus pada orang kaya.
- d. Kebijakan belanja pemerintah harus memenuhi prinsip komitmen kepada aturan syariah yang mana alokasi belanja tersebut hanya pada sesuatu yang diperbolehkan dan tidak haram.
- e. Kebijakan belanja pemerintah harus memenuhi prinsip komitmen terhadap skala prioritas syariah yang dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurat, *hajiyyat*, dan *kamaliyyah*.

Kaidah-kaidah belanja pemerintah di atas merupakan hasil dari pemahaman ayat al-Qur'an berikut ini.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Qs. al-Baqarah 2:219).*

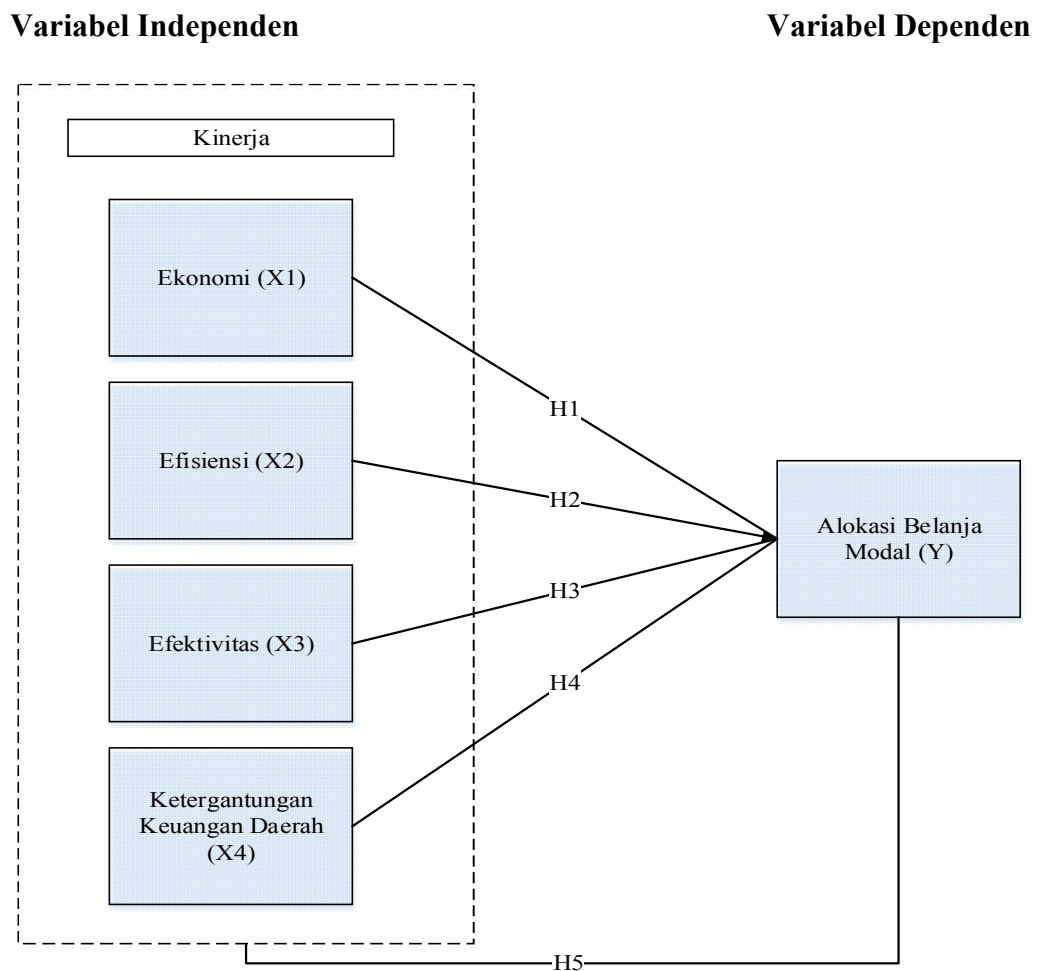
Pada penggalan ayat al-qur’an yang artinya “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan” bermakna bahwa sahabat-sahabat Rasul setelah diperintahkan untuk menafkahkan atau membelanjakan harta di jalan Allah, ada yang bertanya “Kami tidak tahu harta yang mana yang dimaksudkan untuk wajib dinafkahkan itu”. Rasul menjawab “Katakanlah:Kelebihan dari yang perlu”. Jawaban Rasul tersebut menjelaskan bahwa jika keperluan diri sendiri dalam rumah tangga sudah tercukupi, maka sisa dari nafkah tersebut diberikan pada orang yang minta tolong (Hamka, 1990:516).

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan belanja pemerintah maka belanja tersebut harus diutamakan untuk belanja pokok pemerintah. Selebihnya dari dana tersebut dapat digunakan untuk belanja lainnya. Penjelasan ayat tersebut berkaitan dengan prinsip belanja berdasarkan skala prioritas.

Adapun surat al-Hasyr 59:7 yang artinya “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”. Arti ayat tersebut berkaitan dengan prinsip belanja berdasarkan keadilan dan kemaslahatan umum.

### 2.3. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.4. Hipotesis

Pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money* meliputi pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi menggambarkan kehematan dalam pengeluaran-pengeluaran untuk pengadaan sumber daya pada organisasi sektor publik. Jika nilai ekonomi  $<100\%$ , maka kinerja dapat dikatakan ekonomis. Siregar (2018) menyatakan kinerja keuangan yang baik dengan memenuhi kriteria *value for money* dapat memberikan pengaruh pada kinerja pembangunan yang baik. Namun, kinerja yang sangat ekonomis dan efektif tidak mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Menurut Basariyah (2017) dalam Wati et al. (2022), *value for money* menghendaki adanya tingkat ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya termasuk alokasi belanja modal. Oleh karena itu, H1 dirumuskan sebagai berikut.

H1 : Ekonomi (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Jika nilai efisiensi  $<100\%$ , maka kinerja dapat dikatakan efisien. Menurut Harjito, Lestari, Siddiq (2020) efisiensi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, berbanding terbalik dengan Satria (2020) yang menyatakan efisiensi tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, H2 dirumuskan sebagai berikut.

H2 : Efisiensi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Efektivitas menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan. Jika nilai efektivitas  $>100\%$ , maka kinerja dapat dikatakan efektif. Menurut Kusumaningrum & Sugiyanto (2021) efektivitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, berbanding terbalik dengan Praza (2016) yang menyatakan efektivitas tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, H3 dirumuskan sebagai berikut.

H3 : Efektivitas (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Kawatu, 2019:98). Menurut Martini & Dwirandra (2015) ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal, berbanding terbalik dengan Marlianita & Saleh (2020) menemukan bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Oleh karena itu, H4 dirumuskan sebagai berikut.

H4 : Ketergantungan keuangan daerah (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Untuk mengetahui pengaruh kinerja terhadap alokasi belanja modal, maka dapat dilakukan uji secara simultan. Oleh karena itu, H5 dirumuskan sebagai berikut.

H5 : Ekonomi (X1), efisiensi (X2), efektivitas (X3), dan ketergantungan keuangan daerah (X4) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan alat analisis kuantitatif atau statistik guna menguji hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan “penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya” (Siyoto & Sodik, 2015:17). Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu dengan faktual dan cermat.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Terhitung ada 29 Kabupaten dan 9 Kota yang ada di Jawa Timur. Sedangkan, jumlah sampel terhitung 109 sampel.

#### **3.3. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus” (Siyoto & Sodik, 2015:66). Pertimbangan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu: (1) data laporan realisasi anggaran terdata di

djpk.kemenkeu.go.id dan (2) anggaran belanja modal lebih rendah dari anggaran belanja pegawai. Dari pertimbangan tersebut, jumlah sampel terhitung 109 sampel yang mana dihitung dengan mengalikan jumlah daerah dan jumlah periode yang diteliti dikurangi dengan sampel yang tidak diikuti karena tidak sesuai kriteria pengambilan sampel.

$N = (\text{Jumlah Daerah} \times \text{Periode yang diteliti}) - \text{sampel yang tidak diikuti}$

$N = (38 \times 3) - 5$

$N = 109$

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

No	Pemerintah Daerah	Terdata di djpk.kemenkeu.go.id	Anggaran Belanja Modal < Anggaran Belanja Pegawai		
			2019	2020	2021
1	Kab. Bangkalan	v	v	v	v
2	Kab. Banyuwangi	v	v	v	v
3	Kab. Blitar	v	v	v	v
4	Kab. Bojonegoro	v	x	x	x
5	Kab. Bondowoso	v	v	v	v
6	Kab. Gresik	v	v	v	v
7	Kab. Jember	v	v	v	v
8	Kab. Jombang	v	v	v	v
9	Kab. Kediri	v	v	v	v
10	Kab. Lamongan	v	v	v	v
11	Kab. Lumajang	v	v	v	v
12	Kab. Madiun	v	v	v	v
13	Kab. Magetan	v	v	v	v
14	Kab. Malang	v	v	v	v
15	Kab. Mojokerto	v	v	v	v
16	Kab. Nganjuk	v	v	v	v
17	Kab. Ngawi	v	v	v	v
18	Kab. Pacitan	v	v	v	v
19	Kab. Pamekasan	v	v	v	v
20	Kab. Pasuruan	v	v	v	v
21	Kab. Ponorogo	v	v	v	v
22	Kab. Probolinggo	v	v	v	v

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

No	Pemerintah Daerah	Terdata di djp.kemenkeu.go.id	Anggaran Belanja Modal < Anggaran Belanja Pegawai		
			2019	2020	2021
23	Kab. Sampang	v	v	v	v
24	Kab. Sidoarjo	v	v	v	v
25	Kab. Situbondo	v	v	v	v
26	Kab. Sumenep	v	v	v	v
27	Kab. Trenggalek	v	v	v	v
28	Kab. Tuban	v	v	v	v
29	Kab. Tulungagung	v	v	v	v
30	Kota Blitar	v	v	v	v
31	Kota Kediri	v	v	v	v
32	Kota Madiun	v	v	v	v
33	Kota Malang	v	v	v	v
34	Kota Mojokerto	v	v	v	v
35	Kota Pasuruan	v	v	v	v
36	Kota Probolinggo	v	v	v	v
37	Kota Surabaya	v	x	x	v
38	Kota Batu	v	v	v	v

Sumber: djp.kemenkeu.go.id

### 3.4. Data dan Jenis Data

Menurut (Siyoto & Sodik, 2015:67) data merupakan “sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan”. Data dapat berupa angka, huruf, gambar, atau simbol-simbol lainnya yang dapat menggambarkan objek atau fenomena tertentu. Berdasarkan sumbernya, data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari tangan kedua atau berbagai sumber yang telah ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2020. Variabel independen menggunakan data tahun 2018-2020,

sedangkan untuk variabel dependen menggunakan data tahun 2019-2021. Pemilihan data tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Arif & Arza (2018) yang mana untuk variabel dependen menggunakan data APBD di tahun berikutnya.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang sudah ada. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2021 yang diperoleh dari [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id).

### **3.6. Definisi Operasional Variabel**

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel independen yaitu ekonomi (X1), efisiensi (X2), efektivitas (X3), ketergantungan keuangan daerah (X4), dan variabel dependen yaitu alokasi belanja modal (Y).

#### **3.6.1. Ekonomi (X1)**

Ekonomi merupakan penghematan terhadap pengeluaran-pengeluaran untuk pengadaan sumber daya pada organisasi sektor publik (Mahsun, 2013:186). Selain itu, menurut Mahmudi (2019:83) ekonomi berkaitan dengan perubahan sumber daya keuangan menjadi bahan, peralatan, tenaga kerja, dan barang modal yang digunakan untuk operasional organisasi. Ekonomi menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Jika nilai indikator ekonomi  $<100\%$ , maka kinerja dapat dikatakan ekonomis.

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

### 3.6.2. Efisiensi (X2)

Efisiensi merupakan tindakan untuk mengurangi kerugian dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan *output* yang diharapkan (Mahsun, 2013:179). Selain itu, efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang atau pelayanan (Mahmudi, 2019:85). Efisiensi menggambarkan perbandingan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Jika nilai efisiensi <100%, maka kinerja dapat dikatakan efisien.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

### 3.6.3. Efektivitas (X3)

Efektivitas merupakan kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018:166). Semakin besar kontribusi *output* terhadap tujuan organisasi, maka semakin besar pula tingkat efektivitas dari kegiatan, program, atau organisasi tersebut (Mahmudi, 2019:86). Efektivitas menggambarkan perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Jika nilai indikator efektivitas >100%, maka kinerja dapat dikatakan efektif.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

#### 3.6.4. Ketergantungan Keuangan Daerah (X4)

Ketergantungan keuangan daerah merupakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diketahui dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Jika hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah tinggi maka tinggi pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi (Kawatu, 2019: 98).

$$\text{Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 3.6.5. Alokasi Belanja Modal (Y)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 ayat (3) dijelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya jangka panjang. Alokasi belanja modal menggambarkan perbandingan anggaran belanja modal dengan anggaran total belanja daerah.

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Anggaran Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### 3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data dan penafsiran data agar data tersebut mempunyai makna. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 26. Software tersebut juga digunakan dalam pengujian hipotesis dan uji asumsi klasik.

#### 3.7.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear digunakan untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, model ini juga bisa digunakan jika ingin memprediksi nilai variabel berdasarkan nilai variabel lain (Santoso, 2016:350). Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh kinerja berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Rumus regresi linear berganda digambarkan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = Alokasi Belanja Modal

X1 = Ekonomi

X2 = Efisiensi

X3 = Efektivitas

X4 = Ketergantungan Keuangan Daerah

- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi variabel independen
- e = standart error

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat dalam model ini. Uji asumsi klasik tersebut meliputi normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residu mengikuti fungsi distribusi normal atau tidak (Santoso, 2016:368). Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik normal P-P Plot. Jika setiap pencaran data residu berada di sekitar garis lurus melintang, maka residu mengikuti fungsi distribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov  $> 0,05$ , maka residu terdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi kesalahan antara periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (Santoso, 2016:369). Uji ini juga untuk mendeteksi apakah data random atau tidak. Uji ini dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Jika  $du < d < (4 - du)$  maka dapat dikatakan terbebas dari pengaruh autokorelasi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas mengasumsikan bahwa variabel-variabel independen tidak mempunyai hubungan linier satu sama lain (Santoso,



2016:369). Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*varian inflated factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* < 1, maka dapat dikatakan bebas multikolinieritas.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji regresi dapat dilakukan apabila data bersifat homoskedastisitas bukan heteroskedastisitas. Homoskedastisitas merupakan kondisi di mana varians dari data adalah sama pada semua observasi (Santoso, 2016:368). Uji ini dapat dilakukan dengan uji korelasi rank Spearman. Jika nilai signifikansi Abs\_Res > 0,05 maka dapat dikatakan bebas dari pengaruh heteroskedastisitas.

### 3.7.2. Pengujian Hipotesis

#### 3.7.2.1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh ekonomi (X1), efisiensi (X2), efektivitas (X3), dan ketergantungan keuangan daerah (X4) terhadap alokasi belanja modal (Y). Uji t dapat dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada kolom *significance* (sig). Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

### 3.7.2.2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan. Pada penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh ekonomi (X1), efisiensi (X2), efektivitas (X3), dan ketergantungan keuangan daerah (X4) terhadap alokasi belanja modal (Y). Uji F dapat dilakukan dengan melihat tabel ANOVA pada kolom sig. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

### 3.7.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi menunjukkan seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi tinggi, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen akan semakin baik (Supriyadi, 2014:59).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Analisis Kinerja

##### 4.1.1.1. Ekonomi

Ekonomi menunjukkan tingkat penghematan atas pengeluaran-pengeluaran dalam rangka pengadaan sumber daya pada organisasi sektor publik. Kriteria kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis atau tidak, dapat diketahui dengan membandingkan nilai realisasi belanja dengan anggaran belanja. Angka yang menunjukkan nilai lebih dari 100% berarti kinerja pemerintah daerah tidak ekonomis. Sebaliknya, angka yang menunjukkan nilai kurang dari 100% berarti kinerja pemerintah daerah sudah mencapai ekonomis. Berikut ini tabel yang menunjukkan tingkat ekonomi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

**Tabel 4.1**  
**Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Ekonomi (%)			Rata-Rata	Kriteria
		2018	2019	2020		
1	Kab. Bangkalan	95,15	99,00	89,58	94,58	Ekonomis
2	Kab. Banyuwangi	91,49	94,70	93,04	93,08	Ekonomis
3	Kab. Blitar	94,14	98,94	88,76	93,95	Ekonomis
4	Kab. Bojonegoro	91,79	95,66	68,06	85,17	Ekonomis
5	Kab. Bondowoso	106,44	107,13	89,08	100,88	Tidak Ekonomis
6	Kab. Gresik	89,83	95,27	86,75	90,62	Ekonomis
7	Kab. Jember	91,37	96,36	72,76	86,83	Ekonomis
8	Kab. Jombang	91,32	94,80	88,53	91,55	Ekonomis

**Tabel 4.1**  
**Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Ekonomi (%)			Rata-Rata	Kriteria
		2018	2019	2020		
9	Kab. Kediri	94,75	92,88	82,92	90,19	Ekonomis
10	Kab. Lamongan	99,58	97,42	91,12	96,04	Ekonomis
11	Kab. Lumajang	92,95	94,15	84,01	90,37	Ekonomis
12	Kab. Madiun	97,12	99,31	90,67	95,70	Ekonomis
13	Kab. Magetan	96,96	109,68	94,25	100,30	Tidak Ekonomis
14	Kab. Malang	93,09	97,83	88,69	93,20	Ekonomis
15	Kab. Mojokerto	101,47	99,59	92,39	97,82	Ekonomis
16	Kab. Nganjuk	101,50	105,62	92,78	99,97	Ekonomis
17	Kab. Ngawi	99,11	101,30	92,17	97,53	Ekonomis
18	Kab. Pacitan	100,63	102,99	91,49	98,37	Ekonomis
19	Kab. Pamekasan	90,11	92,97	87,50	90,20	Ekonomis
20	Kab. Pasuruan	97,41	90,52	84,32	90,75	Ekonomis
21	Kab. Ponorogo	98,00	103,59	91,36	97,65	Ekonomis
22	Kab. Probolinggo	96,87	99,50	92,68	96,35	Ekonomis
23	Kab. Sampang	93,30	96,34	88,56	92,73	Ekonomis
24	Kab. Sidoarjo	93,66	90,02	82,58	88,75	Ekonomis
25	Kab. Situbondo	110,05	104,13	92,11	102,10	Tidak Ekonomis
26	Kab. Sumenep	96,40	89,56	93,46	93,14	Ekonomis
27	Kab. Trenggalek	97,86	98,77	89,73	95,45	Ekonomis
28	Kab. Tuban	100,64	102,97	91,34	98,32	Ekonomis
29	Kab. Tulungagung	102,30	97,41	95,67	98,46	Ekonomis
30	Kota Blitar	91,15	98,58	84,67	91,47	Ekonomis
31	Kota Kediri	96,22	101,63	84,77	94,21	Ekonomis
32	Kota Madiun	95,13	94,00	79,38	89,50	Ekonomis
33	Kota Malang	93,31	86,56	76,97	85,61	Ekonomis
34	Kota Mojokerto	83,46	85,25	79,29	82,67	Ekonomis
35	Kota Pasuruan	85,01	84,03	75,68	81,57	Ekonomis
36	Kota Probolinggo	93,17	91,06	74,52	86,25	Ekonomis
37	Kota Surabaya	89,69	96,39	77,82	87,96	Ekonomis
38	Kota Batu	91,08	94,65	93,29	93,01	Ekonomis
	<b>Rata-Rata</b>	<b>95,36</b>	<b>96,86</b>	<b>86,65</b>	<b>92,95</b>	<b>Ekonomis</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Tingkat ekonomi di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2018 sampai 2020 terlihat berfluktuasi. Rata-rata tingkat ekonomi pemerintah daerah di Jawa Timur selama tahun 2018 sampai 2020

mencapai kriteria ekonomis dengan tingkat ekonomi mencapai 92,95%. Rata-rata persentase tingkat ekonomi tersebut dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu 95,36% di tahun 2018, kemudian naik menjadi 96,86% di tahun 2019, dan turun menjadi 86,65% di tahun 2020. Rata-rata tingkat ekonomi di tiap tahun tersebut mencapai kriteria ekonomis. Hal tersebut menandakan bahwa realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja sehingga dikatakan ekonomis.

Berdasarkan rata-rata dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terdapat 35 Kabupaten/Kota yang kinerjanya mencapai ekonomis. Kinerja yang ekonomis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan penghematan pada pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Adapun pemerintah daerah yang kinerjanya tidak ekonomis yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Situbondo.

#### 4.1.1.2. Efisiensi

Efisiensi menunjukkan tingkat penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk memperoleh *output* yang maksimal. Kriteria kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien atau tidak, dapat diketahui dengan membandingkan nilai realisasi biaya dengan realisasi pendapatan. Angka yang menunjukkan nilai lebih dari 100% berarti kinerja pemerintah daerah tidak efisien. Sebaliknya, angka yang menunjukkan nilai kurang dari 100% berarti kinerja pemerintah daerah sudah mencapai

efisien. Berikut ini tabel yang menunjukkan tingkat efisiensi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

**Tabel 4.2**  
**Efisiensi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Efisiensi (%)			Rata-Rata (%)	Kriteria
		2018	2019	2020		
1	Kab. Bangkalan	102,60	100,22	98,85	100,56	Tidak Efisien
2	Kab. Banyuwangi	91,86	96,12	96,10	94,69	Efisien
3	Kab. Blitar	93,93	102,55	101,20	99,23	Efisien
4	Kab. Bojonegoro	63,96	96,13	104,65	88,25	Efisien
5	Kab. Bondowoso	96,04	102,26	100,80	99,70	Efisien
6	Kab. Gresik	93,17	95,56	105,31	98,01	Efisien
7	Kab. Jember	96,13	101,60	93,38	97,04	Efisien
8	Kab. Jombang	93,69	99,30	99,56	97,52	Efisien
9	Kab. Kediri	95,48	99,74	99,89	98,37	Efisien
10	Kab. Lamongan	100,10	100,38	99,47	99,98	Efisien
11	Kab. Lumajang	101,11	101,95	95,75	99,60	Efisien
12	Kab. Madiun	96,19	100,07	97,51	97,92	Efisien
13	Kab. Magetan	93,84	102,48	99,37	98,56	Efisien
14	Kab. Malang	95,40	99,60	102,39	99,13	Efisien
15	Kab. Mojokerto	97,57	99,81	100,09	99,16	Efisien
16	Kab. Nganjuk	97,61	101,15	97,86	98,87	Efisien
17	Kab. Ngawi	97,50	100,46	100,79	99,58	Efisien
18	Kab. Pacitan	89,23	111,77	96,65	99,22	Efisien
19	Kab. Pamekasan	93,39	101,52	112,88	102,59	Tidak Efisien
20	Kab. Pasuruan	98,51	96,30	100,66	98,49	Efisien
21	Kab. Ponorogo	96,08	103,70	98,97	99,58	Efisien
22	Kab. Probolinggo	99,42	100,32	98,74	99,49	Efisien
23	Kab. Sampang	99,44	97,13	98,46	98,35	Efisien
24	Kab. Sidoarjo	96,68	97,75	100,43	98,29	Efisien
25	Kab. Situbondo	98,57	100,12	96,05	98,25	Efisien
26	Kab. Sumenep	95,83	92,32	109,81	99,32	Efisien
27	Kab. Trenggalek	95,73	101,76	101,68	99,72	Efisien
28	Kab. Tuban	98,35	96,39	95,54	96,76	Efisien
29	Kab. Tulungagung	95,36	94,45	101,74	97,18	Efisien

**Tabel 4.2**  
**Efisiensi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Efisiensi (%)			Rata-Rata (%)	Kriteria
		2018	2019	2020		
30	Kota Blitar	90,68	103,62	98,54	97,61	Efisien
31	Kota Kediri	96,81	98,02	94,12	96,32	Efisien
32	Kota Madiun	102,90	104,95	95,73	101,19	Tidak Efisien
33	Kota Malang	94,36	87,28	107,53	96,39	Efisien
34	Kota Mojokerto	91,05	96,17	90,79	92,67	Efisien
35	Kota Pasuruan	89,62	96,21	101,87	95,90	Efisien
36	Kota Probolinggo	95,90	110,07	95,19	100,38	Tidak Efisien
37	Kota Surabaya	100,02	104,54	106,46	103,67	Tidak Efisien
38	Kota Batu	86,48	95,71	104,47	95,55	Efisien
	<b>Rata-Rata</b>	<b>95,02</b>	<b>99,72</b>	<b>99,98</b>	<b>98,24</b>	<b>Efisien</b>

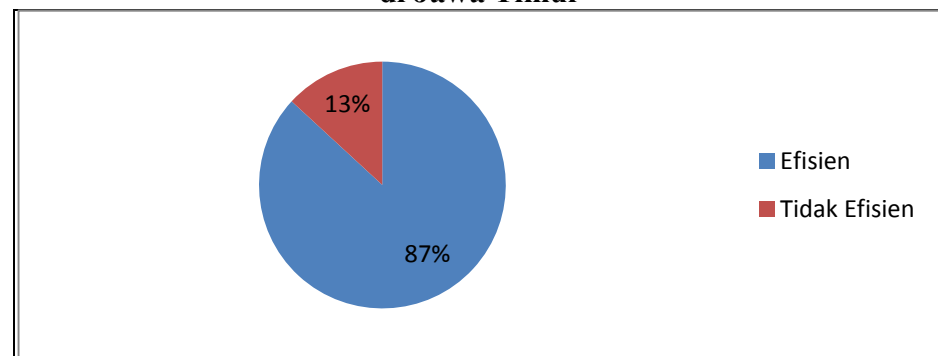
Sumber: Data diolah, 2022

Tingkat efisiensi di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2018 sampai 2020 terlihat berfluktuasi. Rata-rata tingkat efisiensi pemerintah daerah di Jawa Timur selama tahun 2018 sampai 2020 mencapai kriteria efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 98,24%. Rata-rata persentase tingkat efisiensi tersebut dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 95,02% di tahun 2018, 99,72% di tahun 2019, dan 99,98% di tahun 2020. Rata-rata tingkat efisiensi di tiap tahun tersebut mencapai kriteria efisien. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan yang diterima lebih besar dari belanja yang dikeluarkan sehingga dikatakan efisien.

Persentase tingkat efisiensi terendah didapatkan Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 63,96% di tahun 2018. Hal tersebut

menandakan bahwa Kabupaten Bojonegoro memperoleh pendapatan jauh lebih besar dari belanja yang dikeluarkan. Sedangkan, persentase tingkat efisiensi tertinggi didapatkan Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 111,77% di tahun 2019. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten Pacitan belum mencapai efisiensi.

**Gambar 4.1**  
**Diagram Persentase Efisiensi Pemerintah Daerah**  
**di Jawa Timur**



Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat sejumlah 13% kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur mendapatkan kriteria tidak efisien dalam kinerja keuangannya. Tiga belas persen tersebut terdiri dari Kabupaten Bangkalan dengan rata-rata tingkat efisiensi selama tahun 2018 sampai 2020 sebesar 100,56%, Kabupaten Pamekasan dengan rata-rata tingkat efisiensi selama tahun 2018 sampai 2020 sebesar 102,59%, Kota Madiun dengan rata-rata tingkat efisiensi selama tahun 2018 sampai 2020 sebesar 101,19%, Kota Probolinggo dengan rata-rata tingkat efisiensi selama tahun 2018 sampai 2020 sebesar 100,38%, Kota Surabaya dengan rata-rata tingkat efisiensi selama tahun 2018 sampai 2020 sebesar 103,67%.



Kemudian, sejumlah 87% kabupaten/kota di Jawa Timur mendapatkan kriteria efisien dalam kinerja keuangannya. Delapan puluh tujuh persen tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat efisiensi rata-rata kurang dari 100% yang mana hal ini merupakan upaya penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk perolehan pendapatan yang maksimal.

#### 4.1.1.3. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan seberapa besar kontribusi *output* dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat dikatakan efektif atau tidak, dengan melakukan perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Angka yang menunjukkan nilai lebih dari 100% maka dapat dikatakan efektif, sedangkan yang kurang dari 100% berarti kinerjanya tidak efektif. Berikut ini tabel efektivitas pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

**Tabel 4.3**  
**Efektivitas pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Efektivitas (%)			Rata-Rata (%)	Kriteria
		2018	2019	2020		
1	Kab. Bangkalan	98,26	100,99	93,07	97,44	Tidak Efektif
2	Kab. Banyuwangi	100,57	99,14	97,86	99,19	Tidak Efektif
3	Kab. Blitar	102,49	101,63	94,70	99,61	Tidak Efektif
4	Kab. Bojonegoro	142,47	103,01	101,97	115,82	Efektif
5	Kab. Bondowoso	112,56	105,93	94,43	104,31	Efektif

**Tabel 4.3**  
**Efektivitas pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Efektivitas (%)			Rata-Rata (%)	Kriteria
		2018	2019	2020		
6	Kab. Gresik	99,27	102,58	86,08	95,98	Tidak Efektif
7	Kab. Jember	99,74	103,93	89,16	97,61	Tidak Efektif
8	Kab. Jombang	102,36	100,87	94,77	99,33	Tidak Efektif
9	Kab. Kediri	106,61	101,89	96,26	101,59	Efektif
10	Kab. Lamongan	100,45	97,46	92,25	96,72	Tidak Efektif
11	Kab. Lumajang	101,43	97,57	92,83	97,28	Tidak Efektif
12	Kab. Madiun	102,32	99,94	96,32	99,52	Tidak Efektif
13	Kab. Magetan	105,43	110,61	96,60	104,21	Efektif
14	Kab. Malang	102,83	102,60	92,33	99,25	Tidak Efektif
15	Kab. Mojokerto	105,08	102,02	95,80	100,97	Efektif
16	Kab. Nganjuk	111,58	112,27	102,51	108,79	Efektif
17	Kab. Ngawi	105,26	103,06	97,64	101,99	Efektif
18	Kab. Pacitan	113,15	99,57	94,72	102,48	Efektif
19	Kab. Pamekasan	106,73	102,63	99,04	102,80	Efektif
20	Kab. Pasuruan	100,68	98,03	90,32	96,34	Tidak Efektif
21	Kab. Ponorogo	102,01	101,16	94,74	99,31	Tidak Efektif
22	Kab. Probolinggo	101,39	101,19	95,35	99,31	Tidak Efektif
23	Kab. Sampang	101,66	103,60	94,11	99,79	Tidak Efektif
24	Kab. Sidoarjo	107,08	105,16	97,25	103,16	Efektif
25	Kab. Situbondo	117,02	107,95	101,06	108,68	Efektif
26	Kab. Sumenep	102,91	103,08	96,25	100,74	Efektif
27	Kab. Trenggalek	103,66	98,78	92,59	98,35	Tidak Efektif
28	Kab. Tuban	107,72	110,93	99,13	105,93	Efektif
29	Kab. Tulungagung	109,11	104,34	100,58	104,68	Efektif

**Tabel 4.3**  
**Efektivitas pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Efektivitas (%)			Rata-Rata (%)	Kriteria
		2018	2019	2020		
30	Kota Blitar	102,55	98,31	95,69	98,85	Tidak Efektif
31	Kota Kediri	113,09	117,56	103,58	111,41	Efektif
32	Kota Madiun	110,87	99,55	100,28	103,57	Efektif
33	Kota Malang	103,85	104,12	85,44	97,81	Tidak Efektif
34	Kota Mojokerto	99,49	95,67	100,02	98,39	Tidak Efektif
35	Kota Pasuruan	102,70	100,63	95,37	99,57	Tidak Efektif
36	Kota Probolinggo	108,08	89,70	85,55	94,44	Tidak Efektif
37	Kota Surabaya	100,58	100,07	83,07	94,57	Tidak Efektif
38	Kota Batu	105,32	100,58	89,30	98,40	Tidak Efektif
<b>Rata-Rata</b>		<b>105,75</b>	<b>102,32</b>	<b>94,95</b>	<b>101,00</b>	<b>Efektif</b>

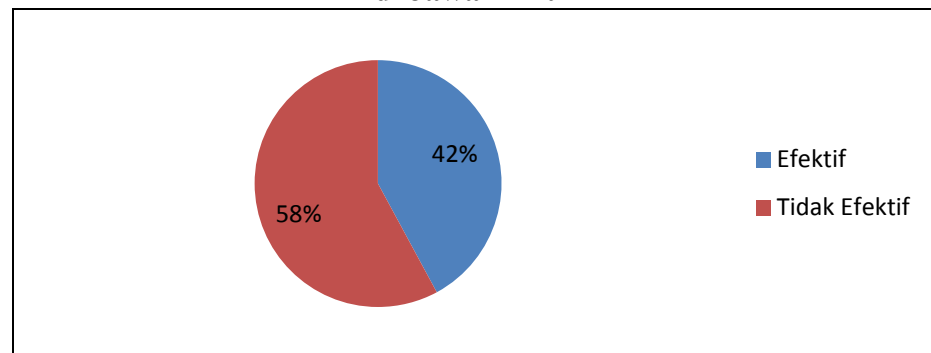
Sumber: Data diolah, 2022

Tingkat efektivitas di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2018 sampai 2020 terlihat berfluktuasi. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2018 sampai 2020 mencapai kriteria efektif dengan tingkat efektivitas mencapai 101,00%. Namun, rata-rata persentase tingkat efektivitas tersebut dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 105,75% di tahun 2018 termasuk kriteria efektif, 102,32% di tahun 2019 termasuk kriteria efektif, dan 94,95% di tahun 2020 termasuk kriteria tidak efektif. Kriteria efektif menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, kriteria tidak efektif menunjukkan bahwa

realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.

Persentase tingkat efektivitas terendah didapatkan Kota Surabaya yaitu sebesar 83,07% di tahun 2020. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Surabaya belum bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dikatakan tidak efektif. Sedangkan, persentase tingkat efektivitas tertinggi didapatkan Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 142,47% di tahun 2018. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah mencapai efektivitas.

**Gambar 4.2**  
**Diagram Persentase Efektivitas Pemerintah Daerah**  
**di Jawa Timur**



Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat sejumlah 58% kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur mendapatkan kriteria tidak efektif dalam kinerja keuangannya. Lima puluh delapan persen tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat efektivitas rata-rata kurang dari 100% yang mana hal ini merupakan tanda belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian, sejumlah 42% kabupaten/kota di Jawa Timur mendapatkan kriteria efektif dalam kinerja keuangannya. Empat puluh

dua persen tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat efektivitas rata-rata lebih dari 100% yang mana hal ini merupakan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4.1.1.4. Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan daerah akan dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan keuangan daerah dapat diketahui dari perbandingan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah bisa dikatakan sangat rendah, rendah, sedang, cukup tinggi, tinggi, atau sangat tinggi. Semakin tinggi nilai perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin tinggi pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

**Tabel 4.4**  
**Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah (%)			Rata-Rata (%)
		2018	2019	2020	
1	Kab. Bangkalan	79,42	77,35	78,44	78,40
2	Kab. Banyuwangi	73,50	72,45	66,03	70,66
3	Kab. Blitar	76,48	76,26	75,65	76,13
4	Kab. Bojonegoro	79,44	82,24	76,36	79,35
5	Kab. Bondowoso	74,35	77,57	78,29	76,74
6	Kab. Gresik	58,73	57,42	57,81	57,99
7	Kab. Jember	71,96	70,44	71,53	71,31
8	Kab. Jombang	62,79	60,64	60,52	61,32
9	Kab. Kediri	72,33	72,75	71,71	72,27

**Tabel 4.4**  
**Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah**  
**di Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah (%)			Rata-Rata (%)
		2018	2019	2020	
10	Kab. Lamongan	60,50	58,27	54,35	57,71
11	Kab. Lumajang	68,63	73,06	70,73	70,81
12	Kab. Madiun	78,57	77,75	75,97	77,43
13	Kab. Magetan	79,91	77,79	79,33	79,01
14	Kab. Malang	72,00	71,49	70,03	71,18
15	Kab. Mojokerto	58,99	66,85	67,13	64,32
16	Kab. Nganjuk	74,48	74,24	73,59	74,10
17	Kab. Ngawi	80,44	78,34	77,69	78,82
18	Kab. Pacitan	74,54	79,91	80,54	78,33
19	Kab. Pamekasan	78,22	78,65	77,94	78,27
20	Kab. Pasuruan	68,54	68,48	66,44	67,82
21	Kab. Ponorogo	78,07	77,22	76,45	77,25
22	Kab. Probolinggo	79,32	78,88	78,65	78,95
23	Kab. Sampang	81,95	80,32	79,92	80,73
24	Kab. Sidoarjo	48,14	47,33	47,54	47,67
25	Kab. Situbondo	78,02	75,27	74,63	75,97
26	Kab. Sumenep	83,76	79,39	80,01	81,06
27	Kab. Trenggalek	77,97	75,79	76,90	76,89
28	Kab. Tuban	71,13	68,63	68,83	69,53
29	Kab. Tulungagung	70,61	71,52	70,30	70,81
30	Kota Blitar	71,50	71,06	70,03	70,87
31	Kota Kediri	70,28	69,14	69,78	69,73
32	Kota Madiun	67,34	67,35	66,60	67,10
33	Kota Malang	59,15	58,37	59,91	59,14
34	Kota Mojokerto	69,84	66,78	64,60	67,07
35	Kota Pasuruan	72,40	69,65	70,09	70,71
36	Kota Probolinggo	67,52	69,56	69,48	68,85
37	Kota Surabaya	26,15	23,81	28,74	26,23
38	Kota Batu	73,64	69,42	73,49	72,18
	<b>Rata-Rata</b>	<b>70,81</b>	<b>70,30</b>	<b>69,90</b>	<b>70,33</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Tingkat ketergantungan keuangan daerah di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2018 sampai 2020 terlihat berfluktuasi. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur selama tahun 2018 sampai 2020 mencapai kriteria sangat tinggi dengan tingkat ketergantungan keuangan mencapai 70,33%. Namun, rata-rata persentase tingkat ketergantungan keuangan tersebut dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 70,81% di tahun 2018, 70,30% di tahun 2019, dan 69,90% di tahun 2020. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan di tiap tahun tersebut mencapai kriteria sangat tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah lebih besar daripada pendapatan yang lainnya.

Persentase tingkat ketergantungan keuangan terendah didapatkan Kota Surabaya yaitu sebesar 23,81% di tahun 2019. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat ketergantungan Kota Surabaya terhadap pemerintah pusat termasuk kriteria sedang. Sedangkan, persentase tingkat ketergantungan keuangan tertinggi didapatkan Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 83,76% di tahun 2018. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Sumenep termasuk kriteria sangat tinggi.

#### 4.1.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.2.1. Uji Normalitas

Metode untuk melakukan uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan untuk uji ini adalah jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov  $> 0,05$ , maka residu terdistribusi normal.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>	
	Unstandardized Residual
N	109
Test Statistic	,067
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, ditemukan bahwa nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Hal tersebut telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yaitu  $> 0,05$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $0,200 > 0,05$  sehingga residu terdistribusi normal.

##### 4.1.2.2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi kesalahan antara periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (Santoso, 2016:369). Metode untuk melakukan uji autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan dalam



uji ini yaitu jika  $du < d < (4 - du)$  maka dapat dikatakan terbebas dari pengaruh autokorelasi.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	1,940

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, nilai Durbin Watson menunjukkan angka 1,940. Nilai Durbin-Watson tersebut akan dibandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson pada taraf signifikansi 5%. Nilai  $du$  sebesar 1,7644, sedangkan nilai  $4 - du$  sebesar 2,2356. Jadi, dapat disimpulkan  $1,7644 < 1,940 < 2,2356$  sehingga terpenuhi dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yang mana hasil menunjukkan model regresi terbebas dari pengaruh autokorelasi.

#### 4.1.2.3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dimaksudkan untuk pengujian terhadap variabel-variabel independen dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa variabel-variabel independen tersebut terbebas dari hubungan yang linier. Dasar pengambilan keputusan untuk uji ini yaitu jika nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $< 1$ , maka model regresi terbebas dari multikolinieritas.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ekonomi	,363	2,757
	Efisiensi	,644	1,552

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Efektivitas	,352	2,844
Ketergantungan Keuangan Daerah	,873	1,145

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, nilai VIF untuk setiap variabel independen yaitu 2,757 pada ekonomi, 1,552 pada efisiensi, 2,844 pada efektivitas, dan 1,145 pada ketergantungan keuangan daerah yang mana nilai VIF tersebut telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yaitu  $< 10$ . Kemudian, nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen yaitu 0,363 pada ekonomi, 0,644 pada efisiensi, 0,352 pada efektivitas, dan 0,873 pada ketergantungan keuangan daerah yang mana nilai *tolerance* tersebut telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yaitu  $< 1$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas.

#### 4.1.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji ketidaksamaan varians dari data pada semua observasi. Metode yang digunakan untuk melakukan uji ini yaitu menggunakan uji korelasi rank Spearman. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu jika nilai signifikansi absolut residual  $> 0,05$  maka model regresi terbebas dari pengaruh heteroskedastisitas.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

			Abs_ Res
Spearman's rho	Ekonomi	Correlation Coefficient	-,162
		Sig. (2-tailed)	,093
		N	109
	Efisiensi	Correlation Coefficient	-,131
		Sig. (2-tailed)	,176
		N	109
	Efektivitas	Correlation Coefficient	,101
		Sig. (2-tailed)	,294
		N	109
	Ketergantungan Keuangan Daerah	Correlation Coefficient	-,124
		Sig. (2-tailed)	,201
		N	109

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, nilai signifikansi Abs\_Res pada masing-masing variabel independen yaitu 0,093 pada ekonomi, 0,176 pada efisiensi, 0,294 pada efektivitas, dan 0,201 pada ketergantungan keuangan daerah. Hasil tersebut telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yaitu  $> 0,05$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari pengaruh heteroskedastisitas.

#### 4.1.3. Hasil Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.9**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	19,398	13,404
	Ekonomi	-,171	,086
	Efisiensi	,014	,101

**Tabel 4.9**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Efektivitas	,183	,098
Ketergantungan Keuangan Daerah	-,107	,047

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, model regresi linear berganda dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut.

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = 19,398 + (-0,171)\text{Ekonomi} + 0,014\text{Efisiensi} + 0,183\text{Efektivitas} + (-0,107)\text{Ketergantungan Keuangan Daerah}$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Nilai konstanta pada persamaan regresi linear berganda di atas menunjukkan angka 19,398 yang berarti alokasi belanja modal akan senilai dengan konstanta jika variabel ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan keuangan daerah bernilai 0.
- b. Koefisien ekonomi sebesar -0,171 berarti setiap ada kenaikan 1% pada variabel ekonomi maka alokasi belanja modal akan turun sebesar 17,1% selama variabel independen yang lain nilainya tetap.
- c. Koefisien efisiensi sebesar 0,014 berarti setiap ada kenaikan 1% pada variabel efisiensi maka alokasi belanja modal akan naik sebesar 1,4% selama variabel independen yang lain nilainya tetap.
- d. Koefisien efektivitas sebesar 0,183 berarti setiap ada kenaikan 1% pada variabel efektivitas maka alokasi belanja modal akan naik sebesar 18,3% selama variabel independen yang lain nilainya tetap.

- e. Koefisien ketergantungan keuangan daerah sebesar -0,107 berarti setiap ada kenaikan 1% pada variabel ketergantungan keuangan daerah maka alokasi belanja modal akan turun sebesar 10,7% selama variabel independen yang lain nilainya tetap.

#### 4.1.4. Pengujian Hipotesis

##### 4.1.4.1. Hasil Uji t

Uji t dimaksudkan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t**

Model		T	Sig.
1	(Constant)	1,447	,151
	Ekonomi	-1,992	,049
	Efisiensi	,139	,889
	Efektivitas	1,866	,065
	Ketergantungan Keuangan Daerah	-2,294	,024

Sumber: Data diolah, 2022

a. Hipotesis Pertama

Rumusan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

H<sub>0</sub> : Ekonomi (X<sub>1</sub>) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

H<sub>a</sub> : Ekonomi (X<sub>1</sub>) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, terlihat nilai signifikansi pada variabel ekonomi sebesar 0,049. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $0,049 < 0,05$  sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang berarti ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

b. Hipotesis Kedua

Rumusan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

H<sub>0</sub> : Efisiensi (X<sub>2</sub>) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

H<sub>a</sub> : Efisiensi (X<sub>2</sub>) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, terlihat nilai signifikansi pada variabel efisiensi sebesar 0,889. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $0,889 > 0,05$  sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak yang berarti efisiensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

### c. Hipotesis Ketiga

Rumusan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

H<sub>0</sub> : Efektivitas (X<sub>3</sub>) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

H<sub>a</sub> : Efektivitas (X<sub>3</sub>) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, terlihat nilai signifikansi pada variabel efektivitas sebesar 0,065. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $0,065 > 0,05$  sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak yang berarti efektivitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

### d. Hipotesis Keempat

Rumusan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

H<sub>0</sub> : Ketergantungan Keuangan Daerah (X<sub>4</sub>) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

H<sub>a</sub> : Ketergantungan Keuangan Daerah (X<sub>4</sub>) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, terlihat nilai signifikansi pada variabel ketergantungan keuangan daerah sebesar 0,024. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $0,024 < 0,05$  sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang berarti ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

#### 4.1.4.2. Hasil Uji F

Uji F dimaksudkan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji F**

Model	F	Sig.
1 Regression	3,663	,008 <sup>b</sup>

Sumber: Data diolah, 2022

Rumusan hipotesis 4 yang diuji adalah sebagai berikut.

$H_0$ : Ekonomi (X1), efisiensi (X2), efektivitas (X3), dan ketergantungan keuangan daerah (X4) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

$H_a$ : Ekonomi (X1), efisiensi (X2), efektivitas (X3), dan ketergantungan keuangan daerah (X4) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, terlihat nilai signifikansi dalam uji F sebesar 0,008. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $0,008 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.



#### 4.1.5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.12**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,351 <sup>a</sup>	,123	,090	3,89094

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai Adjusted R Square menunjukkan angka 0,090 yang berarti bahwa besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 9% dan sisanya sebesar 91% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Koefisien variabel ekonomi pada model regresi linear berganda yang terdapat dalam tabel 4.9 menunjukkan hasil sebesar -0,171. Dikarenakan koefisien tersebut bernilai negatif maka variabel ekonomi memiliki hubungan yang negatif atau berbanding terbalik dengan alokasi belanja modal. Hubungan yang negatif atau berbanding terbalik bermakna jika variabel ekonomi naik maka alokasi belanja modal akan turun, begitupun sebaliknya jika variabel ekonomi turun maka alokasi belanja modal akan naik. Koefisien variabel ekonomi sebesar -0,171 bermakna apabila variabel ekonomi mengalami kenaikan 1% maka alokasi belanja modal akan turun sebesar 17,1% selama

variabel independen yang lainnya tetap. Semakin tinggi nilai ekonomi maka semakin rendah nilai alokasi belanja modal.

Berdasarkan uji t pada tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variabel ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Basariyah (2017) dalam Wati et al. (2022), *value for money* menghendaki adanya tingkat ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya termasuk alokasi belanja modal. Berbeda dengan pendapat Siregar (2018) yang menyatakan kinerja yang sangat ekonomis dan efektif tidak mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Menurut Mahsun, (2013:186) tingkat ekonomi berarti “pengukuran terhadap tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik”. Ekonomi berkaitan dengan seberapa jauh pemerintah dapat menghindari pemborosan dan tidak produktif. Semakin tinggi nilai ekonomi maka semakin rendah nilai alokasi belanja modal. Untuk meningkatkan alokasi belanja modal maka pemerintah daerah di Jawa Timur perlu melakukan penghematan atas pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Belanja daerah harus dengan harga terbaik yang memungkinkan dan memperhatikan kualitasnya.

#### 4.2.2. Pengaruh Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal

Koefisien variabel efisiensi pada model regresi linear berganda yang terdapat dalam tabel 4.9 menunjukkan hasil sebesar 0,014. Koefisien tersebut bernilai positif maka variabel efisiensi memiliki hubungan yang positif atau searah dengan alokasi belanja modal. Hubungan yang positif atau searah bermakna jika variabel efisiensi naik maka alokasi belanja modal akan naik, begitupun sebaliknya jika variabel efisiensi turun maka alokasi belanja modal akan turun. Koefisien variabel efisiensi sebesar 0,014 bermakna apabila variabel efisiensi mengalami kenaikan 1% maka alokasi belanja modal akan naik sebesar 1,4% selama variabel independen yang lainnya tetap. Semakin tinggi nilai efisiensi maka semakin tinggi pula nilai alokasi belanja modal.

Berdasarkan uji t pada tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,889. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya variabel efisiensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Belanja pemerintah termasuk belanja modal harus memenuhi kaidah efisiensi yang mana memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Hal ini akan menghindarkan pemerintah dari sifat mubazir dan kikir, disamping alokasinya pada sektor-sektor yang sesuai syariah (Nasution, 2006 dalam Aini, 2019). Sejumlah 87% kabupaten/kota di Jawa Timur mendapatkan kriteria efisien dalam kinerja keuangannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan porsi belanja modal meningkat. Pemerintah daerah di Jawa Timur kebanyakan tetap mengalokasikan belanja

modal di kisaran 5% sampai 25%. Maka dari itu, tinggi rendahnya tingkat efisiensi tidak mempengaruhi alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Satria (2020) yang menemukan bahwa efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal serta diperkuat oleh penelitian Indiyanti & Rahyuda (2018) yang menemukan bahwa efisiensi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio efisiensi yang menghasilkan kriteria tidak efisien berarti bahwa tingkat pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan yang diterima, sehingga terjadi pemborosan dalam belanja daerah akan tetapi tidak digunakan untuk belanja modal secara maksimal (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Belanja daerah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Belanja daerah tidak terfokus hanya pada belanja tertentu, tetapi harus mempertimbangkan semua jenis belanja daerah yang ditujukan bagi kepentingan umum. Terlebih pada penyediaan infrastruktur bagi daerah-daerah yang kekurangan infrastruktur. Karena infrastruktur berguna untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum yang mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

#### 4.2.3. Pengaruh Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal

Koefisien variabel efektivitas pada model regresi linear berganda yang terdapat dalam tabel 4.9 menunjukkan hasil sebesar 0,183. Koefisien tersebut bernilai positif maka variabel efektivitas memiliki hubungan yang positif atau searah dengan alokasi belanja modal. Hubungan yang positif atau searah

bermakna jika variabel efektivitas naik maka alokasi belanja modal akan naik, begitupun sebaliknya jika variabel efektivitas turun maka alokasi belanja modal akan turun. Koefisien variabel efektivitas sebesar 0,183 bermakna apabila variabel efektivitas mengalami kenaikan 1% maka alokasi belanja modal akan naik sebesar 18,3% selama variabel independen yang lainnya tetap. Semakin tinggi nilai efektivitas maka semakin tinggi pula nilai alokasi belanja modal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai alokasi belanja modal maka kinerja pemerintah daerah harus mencapai efektif.

Berdasarkan uji t pada tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,065. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya variabel efektivitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Menurut Mardiasmo (2018:166) efektivitas berarti “kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*)”. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Dengan tercapainya realisasi pendapatan daerah yang lebih besar daripada target pendapatan daerah di tahun lalu seharusnya dapat menambah alokasi belanja modal di tahun berikutnya. Namun, pemerintah daerah di Jawa Timur lebih besar mengalokasikan dana untuk belanja pegawai daripada belanja modal sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik kurang dimaksimalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Satria (2020) dan Praza (2016) yang menemukan bahwa efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Kusumaningrum & Sugiyanto (2021) yang menemukan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi secara positif oleh rasio efektivitas. Rasio efektivitas diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besarnya alokasi belanja modal. Semakin tinggi nilai rasio efektivitasnya maka pemerintah daerah mempunyai kemampuan yang baik dalam hal merealisasikan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pembangunan daerahnya. Pada masa Nabi Muhammad Saw. terdapat kebijakan keuangan publik yaitu menghimpun dan mendistribusikan pendapatan pada kebutuhan kolektif masyarakat. Kebutuhan kolektif merupakan kebutuhan yang manfaatnya dirasakan orang banyak seperti ketersediaan air bersih, membangun dan memelihara jalan, jembatan, dan irigasi.

#### 4.2.4. Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Koefisien variabel ketergantungan keuangan daerah pada model regresi linear berganda yang terdapat dalam tabel 4.9 menunjukkan hasil sebesar -0,107. Dikarenakan koefisien tersebut bernilai negatif maka variabel ketergantungan keuangan daerah memiliki hubungan yang negatif atau berbanding terbalik dengan alokasi belanja modal. Hubungan yang negatif atau berbanding terbalik bermakna jika variabel ketergantungan keuangan daerah naik maka alokasi belanja modal akan turun, begitupun sebaliknya jika variabel

ketergantungan keuangan daerah turun maka alokasi belanja modal akan naik. Koefisien variabel ketergantungan keuangan daerah sebesar  $-0,107$  bermakna apabila variabel ketergantungan keuangan daerah mengalami kenaikan 1% maka alokasi belanja modal akan turun sebesar 10,7% selama variabel independen yang lainnya tetap. Semakin tinggi nilai ketergantungan keuangan daerah maka semakin rendah nilai alokasi belanja modal.

Berdasarkan uji t pada tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,024. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variabel ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Jika hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah tinggi maka tinggi pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi (Kawatu, 2019: 98). Semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur besar kemungkinan belanja modal dibiayai dari pendapatan transfer. Berdasarkan tabel 4.4 terlihat kebanyakan pemerintah daerah di Jawa Timur tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yaitu  $>50\%$ . Hal tersebut membuktikan bahwa porsi belanja modal dapat ditingkatkan selama pendapatan transfer digunakan semaksimal mungkin untuk belanja modal tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Martini & Dwirandra (2015) dan Praza (2016) yang menemukan bahwa ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin rendah tingkat ketergantungan keuangan daerah, maka daerah

tersebut semakin mandiri sehingga pengalokasian belanja modal menjadi lebih besar (Martini & Dwirandra, 2015). Pada masa Umar bin Khatab, pengelolaan keuangan publik perlu diatur secara sistematis karena selain dibutuhkan oleh pemerintah juga dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah taklukan. Hal tersebut ibarat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya termasuk belanja modal.

#### 4.2.5. Pengaruh Kinerja Berbasis *Value for Money* (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) dan Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh kinerja berbasis *value for money* dan ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal dapat diketahui dengan melakukan uji secara simultan variabel ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan keuangan daerah. Berdasarkan uji F pada tabel 4.11 menunjukkan nilai signifikansi 0,008. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variabel ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan keuangan daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja berbasis *value for money* dan ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah di Jawa Timur.

Siregar (2018) menyatakan kinerja keuangan yang baik dengan memenuhi kriteria *value for money* dapat memberikan pengaruh pada kinerja pembangunan yang baik. Menurut penelitian Kusumaningrum & Sugiyanto



(2021) menemukan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Setiap ada kenaikan pada kinerja keuangan maka akan berdampak pada kenaikan pada belanja modal (Agus & Safri, 2016). Pentingnya mengukur kinerja adalah untuk menilai seberapa tinggi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pelayanan publik dapat berupa jasa publik atau barang publik seperti jalan, jembatan, gedung dan bangunan. Kinerja yang tinggi menunjukkan pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik lagi termasuk penyediaan barang publik yang dibiayai dari alokasi belanja modal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah di Jawa Timur. Secara parsial variabel ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin tinggi nilai ekonomi maka semakin rendah nilai alokasi belanja modal. Untuk meningkatkan alokasi belanja modal maka pemerintah daerah di Jawa Timur perlu melakukan penghematan atas pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Variabel efisiensi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin tinggi nilai efisiensi maka semakin rendah nilai alokasi belanja modal. Akan tetapi, tinggi rendahnya tingkat efisiensi tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Hal tersebut dikarenakan meskipun total belanja daerah tinggi ataupun rendah, pemerintah daerah di Jawa Timur kebanyakan tetap mengalokasikan belanja modal di kisaran 5% sampai 25%.

Variabel efektivitas secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin tinggi nilai efektivitas maka semakin tinggi pula nilai alokasi belanja modal. Dengan tercapainya realisasi pendapatan daerah yang lebih besar daripada target pendapatan daerah di tahun lalu seharusnya dapat menambah alokasi belanja modal di tahun berikutnya. Namun, pemerintah daerah di Jawa Timur lebih besar mengalokasikan dana untuk belanja pegawai daripada

belanja modal sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik kurang maksimal.

Variabel ketergantungan keuangan daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin tinggi nilai ketergantungan keuangan daerah maka semakin rendah nilai alokasi belanja modal. Dengan tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur besar kemungkinan belanja modal dibiayai dari pendapatan transfer.

Secara simultan, variabel ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja berbasis *value for money* dan ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah di Jawa Timur.

## **5.2. Saran**

Saran-saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan anggaran untuk belanja modal agar dapat menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik secara maksimal, seperti pembangunan jalan serta jembatan yang rusak, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah yang kurang memadai. 2) Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menguji variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini dengan menggunakan data terbaru serta menggunakan software statistik yang berbeda seperti EViews. 3) Peneliti selanjutnya dapat memilih objek penelitian pada pemerintah yang mengalokasikan belanja modal jauh dari yang

diharapkan misalnya yang masih di bawah 10%. 4) Peneliti selanjutnya dapat melakukan observasi atau wawancara langsung mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan alokasi belanja modal di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Agus, E., & Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37–50.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2), 43–50.
- Arif, M., & Arza, F. I. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi*, 9(2), 21–36.
- Hamka, B. (1990). Tafsir Al-Azhar. In *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura*.
- Harjito, Y., Lestari, Y. I., & Siddiq, F. R. (2020). Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota Ditinjau dari Indikator Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(2), 24–37.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713–4746.
- Jaelani, A. (2018). *Keuangan Publik; Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon:CV.AKSARASATU.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta:DEEPUBLISH.
- Kristianus, A. (2021). *Kemdagri Minta Pemda Tingkatkan Alokasi Belanja Modal*. [www.beritasatu.com. https://www.beritasatu.com/ekonomi/769737/kemdagri-minta-pemda-tingkatkan-alokasi-belanja-modal](https://www.beritasatu.com/ekonomi/769737/kemdagri-minta-pemda-tingkatkan-alokasi-belanja-modal)
- Kusumaningrum, E. B., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress , dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27(2), 630–643.
- Maguni, W., & Maupa, H. (2018). Teori Motivasi, Kinerja dan Prestasi Kerja dalam Al-Quran serta Pleksibilitas Penerapannya pada Manajemen Perbankan Islam. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 100–124.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:ANDI.
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35.
- Martini, K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 426–443.
- Mihrob, M. (2021). *BPK Soroti Rendahnya Belanja Modal APBD Provinsi Jatim*. www.thejatim.com. <https://thejatim.com/bpk-ri-soroti-rendahnya-belanja-modal-apbd-provinsi-jatim/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 25–36.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 3(2), 256–268.
- Santoso, S. (2016). *Panduan Lengkap SPSS Versi 23*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Satria, M. R. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Pstnt Batan Bandung. *Land Journal*, 1(2), 159–166.
- Siregar, H. A. (2018). Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value For Money dalam Konteks New Public Management dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau. *Bilancia*, 2(1), 85–94.
- Siswoko, A. M. (2022). *Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi*. KOMPAS.com. [https://amp.kompas.com/money/read/2022/08/17/091821326/melecut-belanja-daerah-untuk-pemulihan-ekonomi?fbclid=IwAR1L4PWUKHaCgeneUH7sBDJFTh5cuiNdLsUwIBwP2J\\_9JxZ42UnMMPSJ5mE](https://amp.kompas.com/money/read/2022/08/17/091821326/melecut-belanja-daerah-untuk-pemulihan-ekonomi?fbclid=IwAR1L4PWUKHaCgeneUH7sBDJFTh5cuiNdLsUwIBwP2J_9JxZ42UnMMPSJ5mE)
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Literasi Media Publishing.
- Supriyadi, E. (2014). *SPSS+Amos*. Jakarta:IN MEDIA.

- Wati, Y. K., Hilendri L, B. A., & Mariadi, Y. (2022). Analisis Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 243–259.
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(3), 346–357.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.

## Lampiran 1

### Data Rasio Ekonomi

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja Daerah			Realisasi Belanja Daerah			Ekonomi (%)		
		2019	2020	2021	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kab. Bangkalan	2.360,42	2.362,33	2.287,33	2.087,07	2.336,78	2.116,22	95,15	99,00	89,58
2	Kab. Banyuwangi	3.190,40	3.375,48	3.216,20	2.753,67	3.021,32	3.140,64	91,49	94,70	93,04
3	Kab. Blitar	2.488,79	2.571,91	2.314,92	2.209,34	2.462,29	2.282,94	94,14	98,94	88,76
4	Kab. Bojonegoro	4.793,14	6.404,50	6.219,91	3.085,43	4.585,07	4.358,62	91,79	95,66	68,06
5	Kab. Bondowoso	2.058,94	2.197,29	2.079,28	2.012,07	2.205,81	1.957,38	106,44	107,13	89,08
6	Kab. Gresik	3.128,64	3.568,29	3.433,49	2.679,87	2.980,71	3.095,54	89,83	95,27	86,75
7	Kab. Jember	4.023,38	4.532,28	4.448,91	3.450,10	3.876,91	3.297,61	91,37	96,36	72,76
8	Kab. Jombang	2.799,41	2.854,66	2.766,85	2.354,11	2.653,74	2.527,28	91,32	94,80	88,53
9	Kab. Kediri	3.220,46	3.415,51	3.168,89	2.738,31	2.991,17	2.832,28	94,75	92,88	82,92
10	Kab. Lamongan	2.951,79	3.098,20	2.938,94	2.813,87	2.875,51	2.823,14	99,58	97,42	91,12
11	Kab. Lumajang	2.367,63	2.414,94	2.232,11	2.100,38	2.229,23	2.028,73	92,95	94,15	84,01
12	Kab. Madiun	1.961,81	1.981,48	1.839,39	1.759,82	1.948,31	1.796,56	97,12	99,31	90,67
13	Kab. Magetan	1.809,41	1.899,68	1.898,61	1.716,13	1.984,64	1.790,37	96,96	109,68	94,25
14	Kab. Malang	4.180,22	4.402,48	4.295,12	3.648,52	4.089,40	3.904,35	93,09	97,83	88,69
15	Kab. Mojokerto	2.570,16	2.602,91	2.558,30	2.375,39	2.559,61	2.404,90	101,47	99,59	92,39
16	Kab. Nganjuk	2.406,85	2.568,65	2.335,57	2.312,80	2.542,00	2.383,28	101,50	105,62	92,78
17	Kab. Ngawi	2.183,63	2.328,78	2.270,42	2.026,24	2.212,05	2.146,48	99,11	101,30	92,17
18	Kab. Pacitan	1.865,40	1.716,28	1.670,01	1.595,94	1.921,21	1.570,27	100,63	102,99	91,49
19	Kab. Pamekasan	2.096,44	2.353,21	2.182,10	1.719,32	1.949,15	2.059,12	90,11	92,97	87,50
20	Kab. Pasuruan	3.584,18	3.840,41	3.453,88	3.140,57	3.244,33	3.238,38	97,41	90,52	84,32
21	Kab. Ponorogo	2.335,66	2.439,28	2.379,64	2.210,19	2.419,62	2.228,54	98,00	103,59	91,36
22	Kab. Probolinggo	2.425,01	2.484,14	2.513,85	2.173,59	2.412,87	2.302,24	96,87	99,50	92,68



**Data Rasio Ekonomi**

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja Daerah			Realisasi Belanja Daerah			Ekonomi (%)		
		2019	2020	2021	2018	2019	2020	2018	2019	2020
23	Kab. Sampang	1.870,80	1.954,23	2.111,26	1.688,23	1.802,32	1.730,65	93,30	96,34	88,56
24	Kab. Sidoarjo	4.826,49	5.365,59	5.329,32	4.188,54	4.344,72	4.430,66	93,66	90,02	82,58
25	Kab. Situbondo	1.749,68	1.841,94	1.843,16	1.730,46	1.821,89	1.696,58	110,05	104,13	92,11
26	Kab. Sumenep	2.593,95	2.722,74	2.474,46	2.150,35	2.323,12	2.544,77	96,40	89,56	93,46
27	Kab. Trenggalek	2.051,11	2.075,03	1.951,64	1.746,46	2.025,84	1.861,99	97,86	98,77	89,73
28	Kab. Tuban	2.480,94	2.697,30	2.457,05	2.415,21	2.554,65	2.463,77	100,64	102,97	91,34
29	Kab. Tulungagung	2.678,56	2.763,35	2.506,26	2.576,19	2.609,24	2.643,65	102,30	97,41	95,67
30	Kota Blitar	988,75	1.025,23	960,46	811,04	974,73	868,06	91,15	98,58	84,67
31	Kota Kediri	1.291,79	1.424,63	1.428,49	1.237,75	1.312,91	1.207,69	96,22	101,63	84,77
32	Kota Madiun	1.221,76	1.278,16	1.140,82	1.036,66	1.148,50	1.014,63	95,13	94,00	79,38
33	Kota Malang	2.206,28	2.733,00	2.554,77	1.925,07	1.909,78	2.103,47	93,31	86,56	76,97
34	Kota Mojokerto	999,54	1.014,50	1.042,61	808,16	852,08	804,41	83,46	85,25	79,29
35	Kota Pasuruan	1.026,16	1.089,86	1.097,53	809,44	862,29	824,82	85,01	84,03	75,68
36	Kota Probolinggo	1.162,99	1.177,82	1.089,91	947,11	1.058,97	877,67	93,17	91,06	74,52
37	Kota Surabaya	9.506,27	10.322,23	9.828,39	8.176,93	9.162,66	8.032,68	89,69	96,39	77,82
38	Kota Batu	1.000,47	1.000,05	1.087,36	851,73	946,96	932,96	91,08	94,65	93,29

## Lampiran 2

### Data Rasio Efisiensi

No	Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan			Realisasi Belanja Daerah			Efisiensi (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kab. Bangkalan	2.034,16	2.331,63	2.140,81	2.087,07	2.336,78	2.116,22	102,60	100,22	98,85
2	Kab. Banyuwangi	2.997,64	3.143,28	3.268,23	2.753,67	3.021,32	3.140,64	91,86	96,12	96,10
3	Kab. Blitar	2.352,13	2.401,03	2.255,88	2.209,34	2.462,29	2.282,94	93,93	102,55	101,20
4	Kab. Bojonegoro	4.823,75	4.769,83	4.165,08	3.085,43	4.585,07	4.358,62	63,96	96,13	104,65
5	Kab. Bondowoso	2.094,95	2.156,96	1.941,76	2.012,07	2.205,81	1.957,38	96,04	102,26	100,80
6	Kab. Gresik	2.876,34	3.119,20	2.939,48	2.679,87	2.980,71	3.095,54	93,17	95,56	105,31
7	Kab. Jember	3.588,87	3.815,93	3.531,44	3.450,10	3.876,91	3.297,61	96,13	101,60	93,38
8	Kab. Jombang	2.512,79	2.672,35	2.538,50	2.354,11	2.653,74	2.527,28	93,69	99,30	99,56
9	Kab. Kediri	2.867,95	2.998,84	2.835,33	2.738,31	2.991,17	2.832,28	95,48	99,74	99,89
10	Kab. Lamongan	2.811,06	2.864,50	2.838,27	2.813,87	2.875,51	2.823,14	100,10	100,38	99,47
11	Kab. Lumajang	2.077,40	2.186,59	2.118,85	2.100,38	2.229,23	2.028,73	101,11	101,95	95,75
12	Kab. Madiun	1.829,58	1.947,02	1.842,46	1.759,82	1.948,31	1.796,56	96,19	100,07	97,51
13	Kab. Magetan	1.828,79	1.936,56	1.801,81	1.716,13	1.984,64	1.790,37	93,84	102,48	99,37
14	Kab. Malang	3.824,39	4.105,66	3.813,13	3.648,52	4.089,40	3.904,35	95,40	99,60	102,39
15	Kab. Mojokerto	2.434,62	2.564,37	2.402,66	2.375,39	2.559,61	2.404,90	97,57	99,81	100,09
16	Kab. Nganjuk	2.369,55	2.512,98	2.435,40	2.312,80	2.542,00	2.383,28	97,61	101,15	97,86
17	Kab. Ngawi	2.078,14	2.202,02	2.129,61	2.026,24	2.212,05	2.146,48	97,50	100,46	100,79
18	Kab. Pacitan	1.788,50	1.718,88	1.624,63	1.595,94	1.921,21	1.570,27	89,23	111,77	96,65
19	Kab. Pamekasan	1.841,10	1.920,01	1.824,17	1.719,32	1.949,15	2.059,12	93,39	101,52	112,88
20	Kab. Pasuruan	3.187,96	3.368,81	3.217,08	3.140,57	3.244,33	3.238,38	98,51	96,30	100,66
21	Kab. Ponorogo	2.300,33	2.333,23	2.251,78	2.210,19	2.419,62	2.228,54	96,08	103,70	98,97
22	Kab. Probolinggo	2.186,34	2.405,13	2.331,51	2.173,59	2.412,87	2.302,24	99,42	100,32	98,74
23	Kab. Sampang	1.697,69	1.855,49	1.757,71	1.688,23	1.802,32	1.730,65	99,44	97,13	98,46
24	Kab. Sidoarjo	4.332,58	4.444,63	4.411,62	4.188,54	4.344,72	4.430,66	96,68	97,75	100,43
25	Kab. Situbondo	1.755,59	1.819,66	1.766,33	1.730,46	1.821,89	1.696,58	98,57	100,12	96,05
26	Kab. Sumenep	2.243,99	2.516,51	2.317,33	2.150,35	2.323,12	2.544,77	95,83	92,32	109,81

**Data Rasio Efisiensi**

No	Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan			Realisasi Belanja Daerah			Efisiensi (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
27	Kab. Trenggalek	1.824,36	1.990,86	1.831,18	1.746,46	2.025,84	1.861,99	95,73	101,76	101,68
28	Kab. Tuban	2.455,66	2.650,23	2.578,84	2.415,21	2.554,65	2.463,77	98,35	96,39	95,54
29	Kab. Tulungagung	2.701,55	2.762,65	2.598,32	2.576,19	2.609,24	2.643,65	95,36	94,45	101,74
30	Kota Blitar	894,41	940,72	880,88	811,04	974,73	868,06	90,68	103,62	98,54
31	Kota Kediri	1.278,49	1.339,41	1.283,09	1.237,75	1.312,91	1.207,69	96,81	98,02	94,12
32	Kota Madiun	1.007,45	1.094,37	1.059,91	1.036,66	1.148,50	1.014,63	102,90	104,95	95,73
33	Kota Malang	2.040,19	2.187,99	1.956,09	1.925,07	1.909,78	2.103,47	94,36	87,28	107,53
34	Kota Mojokerto	887,59	885,97	886,03	808,16	852,08	804,41	91,05	96,17	90,79
35	Kota Pasuruan	903,24	896,27	809,67	809,44	862,29	824,82	89,62	96,21	101,87
36	Kota Probolinggo	987,60	962,13	922,03	947,11	1.058,97	877,67	95,90	110,07	95,19
37	Kota Surabaya	8.175,22	8.765,15	7.545,42	8.176,93	9.162,66	8.032,68	100,02	104,54	106,46
38	Kota Batu	984,94	989,38	893,04	851,73	946,96	932,96	86,48	95,71	104,47

**Lampiran 3**

**Data Rasio Efektivitas**

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Pendapatan			Realisasi Pendapatan			Efektivitas (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kab. Bangkalan	2.070,15	2.308,66	2.300,13	2.034,16	2.331,63	2.140,81	98,26	100,99	93,07
2	Kab. Banyuwangi	2.980,74	3.170,40	3.339,78	2.997,64	3.143,28	3.268,23	100,57	99,14	97,86
3	Kab. Blitar	2.295,06	2.362,57	2.382,05	2.352,13	2.401,03	2.255,88	102,49	101,63	94,70
4	Kab. Bojonegoro	3.385,91	4.630,27	4.084,71	4.823,75	4.769,83	4.165,08	142,47	103,01	101,97
5	Kab. Bondowoso	1.861,11	2.036,17	2.056,33	2.094,95	2.156,96	1.941,76	112,56	105,93	94,43
6	Kab. Gresik	2.897,50	3.040,61	3.414,64	2.876,34	3.119,20	2.939,48	99,27	102,58	86,08
7	Kab. Jember	3.598,36	3.671,79	3.960,91	3.588,87	3.815,93	3.531,44	99,74	103,93	89,16
8	Kab. Jombang	2.454,94	2.649,41	2.678,66	2.512,79	2.672,35	2.538,50	102,36	100,87	94,77
9	Kab. Kediri	2.690,17	2.943,21	2.945,41	2.867,95	2.998,84	2.835,33	106,61	101,89	96,26
10	Kab. Lamongan	2.798,40	2.939,29	3.076,80	2.811,06	2.864,50	2.838,27	100,45	97,46	92,25
11	Kab. Lumajang	2.048,03	2.241,13	2.282,44	2.077,40	2.186,59	2.118,85	101,43	97,57	92,83
12	Kab. Madiun	1.788,18	1.948,22	1.912,89	1.829,58	1.947,02	1.842,46	102,32	99,94	96,32
13	Kab. Magetan	1.734,63	1.750,81	1.865,23	1.828,79	1.936,56	1.801,81	105,43	110,61	96,60
14	Kab. Malang	3.719,09	4.001,64	4.129,88	3.824,39	4.105,66	3.813,13	102,83	102,60	92,33
15	Kab. Mojokerto	2.316,89	2.513,66	2.507,88	2.434,62	2.564,37	2.402,66	105,08	102,02	95,80
16	Kab. Nganjuk	2.123,69	2.238,26	2.375,84	2.369,55	2.512,98	2.435,40	111,58	112,27	102,51
17	Kab. Ngawi	1.974,21	2.136,55	2.181,18	2.078,14	2.202,02	2.129,61	105,26	103,06	97,64
18	Kab. Pacitan	1.580,70	1.726,28	1.715,23	1.788,50	1.718,88	1.624,63	113,15	99,57	94,72
19	Kab. Pamekasan	1.724,98	1.870,84	1.841,86	1.841,10	1.920,01	1.824,17	106,73	102,63	99,04
20	Kab. Pasuruan	3.166,46	3.436,52	3.561,82	3.187,96	3.368,81	3.217,08	100,68	98,03	90,32
21	Kab. Ponorogo	2.254,96	2.306,44	2.376,74	2.300,33	2.333,23	2.251,78	102,01	101,16	94,74
22	Kab. Probolinggo	2.156,45	2.376,74	2.445,28	2.186,34	2.405,13	2.331,51	101,39	101,19	95,35
23	Kab. Sampang	1.669,91	1.791,09	1.867,75	1.697,69	1.855,49	1.757,71	101,66	103,60	94,11
24	Kab. Sidoarjo	4.046,26	4.226,49	4.536,59	4.332,58	4.444,63	4.411,62	107,08	105,16	97,25
25	Kab. Situbondo	1.500,27	1.685,68	1.747,72	1.755,59	1.819,66	1.766,33	117,02	107,95	101,06
26	Kab. Sumenep	2.180,56	2.441,43	2.407,65	2.243,99	2.516,51	2.317,33	102,91	103,08	96,25

**Data Rasio Efektivitas**

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Pendapatan			Realisasi Pendapatan			Efektivitas (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
27	Kab. Trenggalek	1.760,00	2.015,35	1.977,63	1.824,36	1.990,86	1.831,18	103,66	98,78	92,59
28	Kab. Tuban	2.279,70	2.389,12	2.601,40	2.455,66	2.650,23	2.578,84	107,72	110,93	99,13
29	Kab. Tulungagung	2.476,07	2.647,74	2.583,35	2.701,55	2.762,65	2.598,32	109,11	104,34	100,58
30	Kota Blitar	872,17	956,92	920,53	894,41	940,72	880,88	102,55	98,31	95,69
31	Kota Kediri	1.130,51	1.139,35	1.238,78	1.278,49	1.339,41	1.283,09	113,09	117,56	103,58
32	Kota Madiun	908,66	1.099,35	1.056,91	1.007,45	1.094,37	1.059,91	110,87	99,55	100,28
33	Kota Malang	1.964,51	2.101,36	2.289,32	2.040,19	2.187,99	1.956,09	103,85	104,12	85,44
34	Kota Mojokerto	892,13	926,11	885,82	887,59	885,97	886,03	99,49	95,67	100,02
35	Kota Pasuruan	879,47	890,66	848,97	903,24	896,27	809,67	102,70	100,63	95,37
36	Kota Probolinggo	913,79	1.072,63	1.077,82	987,60	962,13	922,03	108,08	89,70	85,55
37	Kota Surabaya	8.128,21	8.758,81	9.083,09	8.175,22	8.765,15	7.545,42	100,58	100,07	83,07
38	Kota Batu	935,19	983,71	1.000,05	984,94	989,38	893,04	105,32	100,58	89,30

**Lampiran 4**

**Data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

No	Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer			Realisasi Pendapatan			Ketergantungan Keuangan Daerah (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kab. Bangkalan	1615,47	1803,53	1679,24	2.034,16	2.331,63	2.140,81	79,42	77,35	78,44
2	Kab. Banyuwangi	2203,20	2277,16	2157,95	2.997,64	3.143,28	3.268,23	73,50	72,45	66,03
3	Kab. Blitar	1798,85	1831,10	1706,67	2.352,13	2.401,03	2.255,88	76,48	76,26	75,65
4	Kab. Bojonegoro	3831,91	3922,79	3180,39	4.823,75	4.769,83	4.165,08	79,44	82,24	76,36
5	Kab. Bondowoso	1557,69	1673,10	1520,18	2.094,95	2.156,96	1.941,76	74,35	77,57	78,29
6	Kab. Gresik	1689,20	1791,07	1699,35	2.876,34	3.119,20	2.939,48	58,73	57,42	57,81
7	Kab. Jember	2582,68	2688,01	2525,94	3.588,87	3.815,93	3.531,44	71,96	70,44	71,53
8	Kab. Jombang	1577,76	1620,56	1536,18	2.512,79	2.672,35	2.538,50	62,79	60,64	60,52
9	Kab. Kediri	2074,49	2181,65	2033,31	2.867,95	2.998,84	2.835,33	72,33	72,75	71,71
10	Kab. Lamongan	1700,71	1669,27	1542,72	2.811,06	2.864,50	2.838,27	60,50	58,27	54,35
11	Kab. Lumajang	1425,75	1597,58	1498,58	2.077,40	2.186,59	2.118,85	68,63	73,06	70,73
12	Kab. Madiun	1437,50	1513,73	1399,77	1.829,58	1.947,02	1.842,46	78,57	77,75	75,97
13	Kab. Magetan	1461,33	1506,47	1429,34	1.828,79	1.936,56	1.801,81	79,91	77,79	79,33
14	Kab. Malang	2753,53	2935,33	2670,41	3.824,39	4.105,66	3.813,13	72,00	71,49	70,03
15	Kab. Mojokerto	1436,27	1714,28	1612,93	2.434,62	2.564,37	2.402,66	58,99	66,85	67,13
16	Kab. Nganjuk	1764,92	1865,64	1792,16	2.369,55	2.512,98	2.435,40	74,48	74,24	73,59
17	Kab. Ngawi	1671,69	1725,12	1654,39	2.078,14	2.202,02	2.129,61	80,44	78,34	77,69
18	Kab. Pacitan	1333,06	1373,60	1308,42	1.788,50	1.718,88	1.624,63	74,54	79,91	80,54
19	Kab. Pamekasan	1440,17	1510,15	1421,73	1.841,10	1.920,01	1.824,17	78,22	78,65	77,94
20	Kab. Pasuruan	2185,10	2307,09	2137,27	3.187,96	3.368,81	3.217,08	68,54	68,48	66,44
21	Kab. Ponorogo	1795,88	1801,83	1721,51	2.300,33	2.333,23	2.251,78	78,07	77,22	76,45
22	Kab. Probolinggo	1734,11	1897,26	1833,82	2.186,34	2.405,13	2.331,51	79,32	78,88	78,65
23	Kab. Sampang	1391,32	1490,33	1404,80	1.697,69	1.855,49	1.757,71	81,95	80,32	79,92
24	Kab. Sidoarjo	2085,87	2103,68	2097,43	4.332,58	4.444,63	4.411,62	48,14	47,33	47,54

**Data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

No	Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer			Realisasi Pendapatan			Ketergantungan Keuangan Daerah (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
25	Kab. Situbondo	1369,65	1369,73	1318,19	1.755,59	1.819,66	1.766,33	78,02	75,27	74,63
26	Kab. Sumenep	1879,67	1997,78	1854,19	2.243,99	2.516,51	2.317,33	83,76	79,39	80,01
27	Kab. Trenggalek	1422,50	1508,81	1408,17	1.824,36	1.990,86	1.831,18	77,97	75,79	76,90
28	Kab. Tuban	1746,67	1818,92	1774,90	2.455,66	2.650,23	2.578,84	71,13	68,63	68,83
29	Kab. Tulungagung	1907,63	1975,86	1826,52	2.701,55	2.762,65	2.598,32	70,61	71,52	70,30
30	Kota Blitar	639,53	668,51	616,91	894,41	940,72	880,88	71,50	71,06	70,03
31	Kota Kediri	898,49	926,02	895,35	1.278,49	1.339,41	1.283,09	70,28	69,14	69,78
32	Kota Madiun	678,42	737,08	705,88	1.007,45	1.094,37	1.059,91	67,34	67,35	66,60
33	Kota Malang	1206,79	1277,12	1171,90	2.040,19	2.187,99	1.956,09	59,15	58,37	59,91
34	Kota Mojokerto	619,88	591,64	572,41	887,59	885,97	886,03	69,84	66,78	64,60
35	Kota Pasuruan	653,99	624,27	567,46	903,24	896,27	809,67	72,40	69,65	70,09
36	Kota Probolinggo	666,82	669,24	640,62	987,60	962,13	922,03	67,52	69,56	69,48
37	Kota Surabaya	2137,62	2086,96	2168,18	8.175,22	8.765,15	7.545,42	26,15	23,81	28,74
38	Kota Batu	725,34	686,78	656,28	984,94	989,38	893,04	73,64	69,42	73,49

**Lampiran 5**

**Data Alokasi Belanja Modal**

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja Daerah			Anggaran Belanja Modal			Alokasi Belanja Modal		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Bangkalan	2.360,42	2.362,33	2.287,33	399,98	244,34	260,50	16,95	10,34	11,39
2	Kab. Banyuwangi	3.190,40	3.375,48	3.216,20	544,41	555,26	609,00	17,06	16,45	18,94
3	Kab. Blitar	2.488,79	2.571,91	2.314,92	522,88	470,09	312,50	21,01	18,28	13,50
4	Kab. Bojonegoro	4.793,14	6.404,50	6.219,91	1.585,60	2.418,34	1.973,50	33,08	37,76	31,73
5	Kab. Bondowoso	2.058,94	2.197,29	2.079,28	311,38	295,66	253,04	15,12	13,46	12,17
6	Kab. Gresik	3.128,64	3.568,29	3.433,49	561,44	679,96	468,83	17,95	19,06	13,65
7	Kab. Jember	4.023,38	4.532,28	4.448,91	908,72	798,73	681,33	22,59	17,62	15,31
8	Kab. Jombang	2.799,41	2.854,66	2.766,85	309,96	306,27	296,41	11,07	10,73	10,71
9	Kab. Kediri	3.220,46	3.415,51	3.168,89	672,29	685,65	416,19	20,88	20,07	13,13
10	Kab. Lamongan	2.951,79	3.098,20	2.938,94	488,69	412,28	409,96	16,56	13,31	13,95
11	Kab. Lumajang	2.367,63	2.414,94	2.232,11	298,20	297,66	224,63	12,59	12,33	10,06
12	Kab. Madiun	1.961,81	1.981,48	1.839,39	335,22	315,72	200,96	17,09	15,93	10,93
13	Kab. Magetan	1.809,41	1.899,68	1.898,61	212,55	247,73	146,72	11,75	13,04	7,73
14	Kab. Malang	4.180,22	4.402,48	4.295,12	737,14	665,64	575,50	17,63	15,12	13,40
15	Kab. Mojokerto	2.570,16	2.602,91	2.558,30	511,08	364,68	322,45	19,89	14,01	12,60
16	Kab. Nganjuk	2.406,85	2.568,65	2.335,57	293,47	260,91	224,73	12,19	10,16	9,62
17	Kab. Ngawi	2.183,63	2.328,78	2.270,42	338,61	381,74	328,18	15,51	16,39	14,45
18	Kab. Pacitan	1.865,40	1.716,28	1.670,01	342,04	210,80	217,26	18,34	12,28	13,01
19	Kab. Pamekasan	2.096,44	2.353,21	2.182,10	405,45	553,95	411,50	19,34	23,54	18,86
20	Kab. Pasuruan	3.584,18	3.840,41	3.453,88	479,03	656,08	500,60	13,37	17,08	14,49



**Data Alokasi Belanja Modal**

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja Daerah			Anggaran Belanja Modal			Alokasi Belanja Modal		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
21	Kab. Ponorogo	2.335,66	2.439,28	2.379,64	374,92	364,16	454,55	16,05	14,93	19,10
22	Kab. Probolinggo	2.425,01	2.484,14	2.513,85	324,73	354,16	357,79	13,39	14,26	14,23
23	Kab. Sampang	1.870,80	1.954,23	2.111,26	337,88	351,54	436,30	18,06	17,99	20,67
24	Kab. Sidoarjo	4.826,49	5.365,59	5.329,32	1.016,47	1.311,37	1.171,94	21,06	24,44	21,99
25	Kab. Situbondo	1.749,68	1.841,94	1.843,16	282,30	282,57	281,37	16,13	15,34	15,27
26	Kab. Sumenep	2.593,95	2.722,74	2.474,46	447,32	374,77	237,26	17,24	13,76	9,59
27	Kab. Trenggalek	2.051,11	2.075,03	1.951,64	387,43	319,11	265,08	18,89	15,38	13,58
28	Kab. Tuban	2.480,94	2.697,30	2.457,05	405,85	456,85	266,94	16,36	16,94	10,86
29	Kab. Tulungagung	2.678,56	2.763,35	2.506,26	280,88	321,37	222,10	10,49	11,63	8,86
30	Kota Blitar	988,75	1.025,23	960,46	215,33	149,94	125,15	21,78	14,63	13,03
31	Kota Kediri	1.291,79	1.424,63	1.428,49	129,54	125,03	81,52	10,03	8,78	5,71
32	Kota Madiun	1.221,76	1.278,16	1.140,82	275,63	286,00	197,74	22,56	22,38	17,33
33	Kota Malang	2.206,28	2.733,00	2.554,77	355,59	628,01	347,62	16,12	22,98	13,61
34	Kota Mojokerto	999,54	1.014,50	1.042,61	192,19	190,38	218,26	19,23	18,77	20,93
35	Kota Pasuruan	1.026,16	1.089,86	1.097,53	228,29	219,23	187,47	22,25	20,12	17,08
36	Kota Probolinggo	1.162,99	1.177,82	1.089,91	261,89	229,93	167,43	22,52	19,52	15,36
37	Kota Surabaya	9.506,27	10.322,23	9.828,39	2.806,52	3.081,53	2.369,91	29,52	29,85	24,11
38	Kota Batu	1.000,47	1.000,05	1.087,36	122,77	82,00	161,67	12,27	8,20	14,87

## Lampiran 6

### Hasil Uji SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		109
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,81820280
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,033
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,351 <sup>a</sup>	,123	,090	3,89094	1,940

- a. Predictors: (Constant), Ketergantungan Keuangan Daerah, Efisiensi, Ekonomi, Efektivitas
- b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Correlations							
			Ekonomi	Efisiensi	Efektivitas	Ketergantungan Keuangan Daerah	Abs_ Res
Spearman's rho	Ekonomi	Correlation Coefficient	1,000	,165	,624**	,309**	-,162
		Sig. (2- tailed)	.	,086	,000	,001	,093
		N	109	109	109	109	109
	Efisiensi	Correlation Coefficient	,165	1,000	-,354**	,090	-,131
		Sig. (2- tailed)	,086	.	,000	,353	,176
		N	109	109	109	109	109
	Efektivitas	Correlation Coefficient	,624**	-,354**	1,000	,110	,101
		Sig. (2- tailed)	,000	,000	.	,256	,294
		N	109	109	109	109	109
	Ketergantungan Keuangan Daerah	Correlation Coefficient	,309**	,090	,110	1,000	-,124
		Sig. (2- tailed)	,001	,353	,256	.	,201
		N	109	109	109	109	109
	Abs_Res	Correlation Coefficient	-,162	-,131	,101	-,124	1,000
		Sig. (2- tailed)	,093	,176	,294	,201	.
		N	109	109	109	109	109
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19,398	13,404		1,447	,151		
	Ekonomi	-,171	,086	-,304	-1,992	,049	,363	2,757
	Efisiensi	,014	,101	,016	,139	,889	,644	1,552
	Efektivitas	,183	,098	,289	1,866	,065	,352	2,844
	Ketergantungan Keuangan Daerah	-,107	,047	-,225	-2,294	,024	,873	1,145

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	221,803	4	55,451	3,663	,008 <sup>b</sup>
	Residual	1574,497	104	15,139		
	Total	1796,300	108			

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Ketergantungan Keuangan Daerah, Efisiensi, Ekonomi, Efektivitas

## **Lampiran 7**

### **BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : Dwi Nur Kholifa  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 5 September 2000  
Alamat Asal : Kaliwungu Kembangan, Tempeh, Lumajang  
Telepon/HP : 085745792357  
E-mail : [dwinurkholifa1@gmail.com](mailto:dwinurkholifa1@gmail.com)  
Instagram : dwinur112

#### **Pendidikan Formal**

2006 - 2012 : SD Negeri Kaliwungu 1  
2012 - 2015 : SMP Negeri 1 Tempeh  
2015 - 2018 : SMK Negeri 1 Lumajang  
2018 - 2022 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **Pendidikan Non Formal**

2018 - 2019 : PKPBA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
2019 - 2020 : PKPBI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

#### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota Accounting Development Community tahun 2020

- Anggota Asisten Laboratorium Akuntansi UIN Malang tahun 2021

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta pelatihan MYOB Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2021
- Panitia pelatihan MYOB Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2021
- Peserta Webinar Rahasia Tuntaskan Skripsi atau Tesis oleh E-Bizmark Solutions tahun 2021